

POTRET FASILITAS BELAJAR MENGAJAR

FORWAS

Mengembangkan dan Memasyarakatkan Pengawasan

**2019 Tidak Ada Lagi
Sekolah Rusak**



Edisi ke II / 2017



Cover Story

Ilustrasi sekolah runtuh
(foto: ILUSTRASI)

LAPORAN UTAMA

POTRET FASILITAS BELAJAR MENGAJAR:

DARI BERATAP TENDA HINGGA GEDUNG MEWAH 4



Siswa Madrasah tidak kalah bersaing di bidang sains dengan siswa sekolah umum

LAPORAN KHUSUS

DIRJEN DIKDASMEN, HAMID MUHAMMAD, M.SC., PH.D.

2019 Tidak Ada Lagi Sekolah Rusak 7

PROFIL

SOSOK HINDUN BASRI PURBA:

KOMANDAN TERDEPAN MENOLAK GRATIFIKASI14

BERMULA DARI KOTA MEDAN20

CUPLIKAN PERISTIWA

- | | |
|--|---|
| <p>24 Peringati Hari Lahir Pancasila, Kemendikbud Gelar Upacara</p> <p>25 Upaya Penguatan RBI dan WBK Di LPMP Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>26 Irjen Sosialisasi PPDB Bebas Pungli</p> <p>27 Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kemendikbud</p> <p>27 Kemendikbud Gelar Diskusi Penguatan Karakter melalui Lima Hari Sekolah</p> <p>28 Peserta Telaah Sejawat Meningkat, Mari Capai Level 3 IACM</p> <p>30 Workshop CACM Guna Deteksi Masalah Risiko Keuangan & Operasional Organisasi</p> <p>31 Hari Pertama Bekerja, Lobi Itjen Ramai Pegawai</p> <p>32 Pelaku Pendidikan Provinsi Riau Berikrar Dukung PPK</p> <p>33 Kepolisian Republik Indonesia Dukung Program Penguatan Pendidikan Karakter</p> <p>34 PPDB 2017, Irjen: Banyak Laporan Terkait Kendala Server</p> <p>35 PPDB 2017, Irjen: Stop Paradigma Sekolah Eksklusif,</p> | <p>36 Ratakan Kualitas Pendidikan Cegah Kekerasan dalam PPDB 2017 Dengan Permendikbud No.18 Tahun 2016</p> <p>37 Indonesia – Swiss Sepakati Kerjasama Pendidikan Vokasional</p> <p>38 Capai Nawacita di Bidang Pendidikan, Penguatan Pendidikan Karakter Terus Digalakkan</p> <p>39 Star Bantu Fokus Penggunaan Anggaran</p> <p>40 Raker Inspektorat I, Itjen Siapkan Tiga Satker Menuju WBK</p> <p>41 Hari Pertama Sekolah, Mendikbud Pimpin Apel Anak Cerdas Berkarakter</p> <p>42 Libatkan 16 Kementerian/ Lembaga, Itjen Kemendikbud Gelar Bimtek Telaah Sejawat</p> <p>43 Cegah Perundungan Butuh Kerja sama Banyak Pihak</p> <p>44 Menteri dan Pejabat Kemdikbud Hadiri Penyampaian Temuan dalam PPDB di Ombudsman RI</p> <p>45 Meriahnya Merdeka</p> |
|--|---|

ARTIKEL

- | | |
|--|--|
| <p>48 Strategi Mempertahankan Opini WTP</p> <p>52 Inspektorat III Itjen Kemdikbud Siapkan Kegiatan Auditor sebagai Konsultan</p> | <p>54 Arah Perkembangan Audit Internal: Perubahan Pendekatan Audit dari Konvensional ke Audit Kinerja di Itjen Kemendikbud</p> <p>58 Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal melalui Tim <i>Liaison Officer</i> (LO)</p> |
|--|--|

HALAMAN TERAKHIR

- 61** | *The Top 10 Best Education*

Editorial

Penerbitan edisi yang ada di tangan pembaca kali ini sengaja menyesuaikan suasana dan spirit hari kemerdekaan RI ke-72 bertema “Kerja Bersama,” sebuah kata kunci yang sangat relevan dalam menggelorakan gotong royong untuk mewujudkan percepatan dan pemerataan pendidikan berkualitas di tanah merdeka.

Memotret sisi lain dari kerusakan sarana dan prasana sekolah yang sedang masif di tanah air misalnya, adalah salah satu bentuk partisipasif dan semangat kegotongroyongan yang kini sedang diambangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bersama-sama mengajak unsur pemangku kepentingan lainnya seperti DPR, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat guna mencari solusi sebaik dan secepat-cepatnya demi masa depan Indonesia merdeka.

Banyak pekerjaan dituntaskan dalam menangani problema sekolah rusak itu, tetapi kita juga tidak menutup mata bahwa masih banyak pula yang sedang dan akan dilakukan pemerintah hingga diharapkan target menuntaskan masalah tersebut dapat tercapai pada tahun 2019.

Edisi ini juga sengaja kami sajikan dalam bentuk *indepth reporting* terhadap sosok Hindun Basri Purba, saat-saat terakhir menjelang purna tugas sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus sebagai bentuk “penghormatan” serta *legacy* keteladanan bagi generasi penerusnya.

Dirgahayu Indonesia, bagimu negeri kami berbakti !!!

Salam dari redaksi



Itjen Kemdikbud

Rapat Tim Redaksi Edisi II Tahun 2017



Istimewa

POTRET FASILITAS BELAJAR MENGAJAR: DARI BERATAP TENDA HINGGA GEDUNG MEWAH

Kerumunan murid Sekolah Dasar Negeri Sirna Asih di Kabupaten Bogor masih terlihat bersimbah peluh lantaran harus berlari beberapa kilometer dari rumah menuju sekolah. Mereka harus bersabar masuk kelas karena harus

menunggu beberapa guru membetulkan tenda plastik yang menutupi atap dan dinding sekolah akibat diterpa angin dan hujan malam sebelumnya. Pemandangan ini hanya potret kecil tentang fasilitas belajar mengajar di provinsi Jawa Barat yang kebetulan

paling banyak ditemukan fasilitas sekolah rusak.

Bagi warga kecamatan Cigudeg, sekolah ini bukanlah satu-satunya pilihan namun hanya SDN inilah yang terdekat dengan jarak tempuh 1,5 jam perjalanan dari rumah penduduk.

Walaupun sudah enam tahun kondisinya seperti itu dengan lantai tanah, dinding, dan atap terpal plastik serta meja dan kursi seadanya namun tidak menghalangi kegiatan belajar mengajar yang didukung oleh tenaga pendidik yang seadanya pula.

Pemandangan menjadi sangat kontras jika membanding suasana sekolah di daerah tetangganya di pinggiran Jakarta yang umumnya sudah memiliki gedung sekolah permanen yang bersih dan terpelihara serta didukung fasilitas belajar mengajar modern.

Menurut data pendidikan Kemendikbud 2016/2017, Jawa Barat paling banyak memiliki fasilitas ruang kelas Sekolah Dasar yang rusak. Dari 138.252 sekolah yang ada di provinsi ini mulai jenjang SD, SMP dan SMA, 7.060 di antaranya mengalami rusak total, 9.533 rusak berat, 11.250 rusak sedang dan 82.392 rusak ringan sedangkan yang tergolong baik sebanyak 28.017 buah sekolah.

Di Indonesia kini memiliki 1.049.116 buah fasilitas sekolah dasar, 49.875 buah di antaranya mengalami rusak total, 58.269 rusak berat,

69.551 rusak sedang, 601.393 rusak ringan dan 270.028 buah dinyatakan dalam kondisi baik. Temuan ini belum termasuk sarana prasarana sekolah untuk jenjang SMP dan SMA.

Anggaran fungsi pendidikan di 2017 tetap dipertahankan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Fokusnya pada peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan. Besaran anggaran fungsi pendidikan ini mencapai Rp 416,09 triliun. Dari total anggaran tersebut, 64,4 persennya ditransfer langsung ke daerah untuk membantu

Istimewa



Laporan Utama



Istimewa

pembiayaan kebutuhan pendidikan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Harapannya agar pendidikan merata, berkeadilan, dan berkualitas.

Anggaran Fungsi Pendidikan 2017 64 persen lebih untuk pembiayaan pendidikan di daerah. Anggaran pendidikan tahun ini memang turun dibandingkan tahun lalu. Jika pada 2016, anggaran yang dikururkan mencapai Rp 419,2 triliun, tahun ini turun menjadi Rp 416,09 triliun. Meski turun, namun anggaran yang ditransfer ke daerah justru naik 0,12 persen atau sebesar Rp 268,18 triliun. Besarnya anggaran yang ditransfer ke daerah ini guna memperkuat implementasi Nawacita, yaitu membangun

Indonesia dari pinggiran.

Anggaran tersebut terbagi dalam delapan bagian, yaitu Rp 147,8 triliun untuk dana alokasi umum (DAU); Rp 1,4 triliun untuk tambahan penghasilan guru; Rp 55,6 triliun untuk tunjangan profesi guru; Rp 3,5 triliun untuk Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP); Rp 45,1 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Rp 1,7 triliun untuk tunjangan guru daerah khusus; Rp 6,1 triliun untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), dan sisanya Rp 6,8 triliun digunakan untuk pembiayaan lainnya.

Meskipun daerah menerima anggaran tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud),

Muhadjir Effendy mengingatkan agar pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran pendidikan di daerahnya sekurang-kurangnya 20 persen dari Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana amanat undang-undang.

Yang terjadi di lapangan, banyak daerah yang mendapat transfer dana berupa DAU dan DAK Total Belanja Negara Rp 2.080,45 triliun, Transfer Daerah Rp 268,18 triliun, Kemendikbud Rp 39,82 triliun, Kemenag Rp 50,44 triliun, Kemenristekdikti Rp 38,73 triliun, Anggaran Pendidikan Rp 416,09 triliun. ■ (Emte)

Dirjen Dikdasmen, Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D.



Radio Itjen Kemdikbud



2019 TIDAK ADA LAGI SEKOLAH RUSAK

Bertahun-tahun dilema penanganan bangunan fasilitas sekolah yang rusak seakan tak berkesudahan, tetapi tiba-tiba kabar baik berhembus dari gedung Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Jakarta yang menyatakan target paling lambat tahun 2019 “momok” penghambat proses belajar mengajar itu akan dituntaskan. Sejak awal 2017 sudah direhabilitasi hampir sepertiga dari 260 ribu lebih ruang kelas yang mengalami rusak sedang, rusak berat, dan rusak total.

“iya, iya kami sangat serius membantu mengatasi hambatan kerusakan ruang kelas itu, walaupun keterbatasan alokasi dana pendidikan yang dikelola Kemendikbud tidak banyak,” tegas Dirjen Dikdasmen, Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D. ketika berbincang dengan kru majalah Forwas di kantornya di lingkungan perkantoran Kemendikbud Jakarta.

Menurut peraturan serta besarnya alokasi dana pendidikan yang dikucur kepada daerah, rehabilitasi bangunan sekolah rusak tersebut

pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi untuk jenjang Sekolah Menengah (SMA/SMK) serta pemerintah kabupaten/kota untuk jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, sementara pemerintah pusat melalui Kemendikbud hanyalah *back up* khususnya untuk daerah-daerah yang dikenal dengan istilah daerah terpencil, terisolir, dan daerah tertinggal.

“Tapi sudahlah, kita tidak perlu jelimat mempersoalkan itu yang penting adalah bagaimana

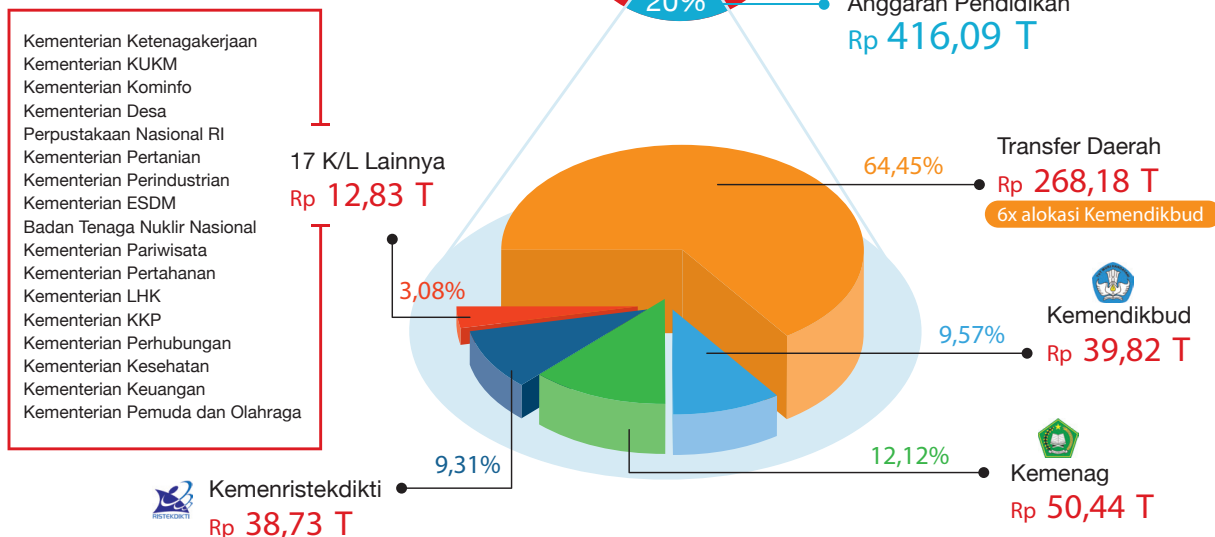
anak-anak peserta didik dan guru merasakan bahwa negara hadir di saat dibutuhkan,” ucap pria lulusan terbaik dan mahasiswa teladan IKIP Malang itu.

Data terakhir hasil pemantauan Ditjen Dikdasmen, saat ini Indonesia memiliki 1.719.468 ruang kelas satuan pendidikan yang dari jenjang SD sebanyak 1.051.884 ruang kelas, SMP 349.351 ruang kelas, SMA 153.703 ruang kelas, SMK 144.605 ruang kelas dan Sekolah Luar Biasa (SLB) 19.925 ruang kelas. Dari pemantauan tersebut

POSTUR

ANGGARAN PENDIDIKAN

2017



sumber: BKLM

hanya 518.620 ruang kelas yang benar-benar berkualitas baik dan layak sebagai sarana prasarana kegiatan belajar mengajar.

Khusus untuk fasilitas ruang belajar Sekolah Dasar, penyebab memburuknya kondisi fisik bangunan antara lain disebabkan kondisi usia pakai yang umumnya berasal dari bangunan SD Inpres tahun 1970-an disertai dengan rendahnya anggaran yang disediakan daerah serta ketidakseriusan dalam hal perawatan bangunan. Gejala itu makin terlihat sejak tahun 2003 lalu, kemudian Kemendikbud mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK)

kemudian berlanjut tahun 2010 untuk bangunan SMP sedang sejak tahun 2012 diperluas untuk menjaga pemeliharaan bangunan SMA/ SMK.

Di antara ruang kelas di seluruh jenjang pendidikan itu, ditemukan bangunan SD paling besar mengalami kerusakan dan umumnya berada di daerah pedesaan serta bangunan lama warisan yang dahulu dikenal sebagai sekolah Inpres. Ruang kelas SD yang mengalami rusak ringan sebanyak 597.000 buah, 77.907 rusak sedang, 58.991 rusak berat dan 43.812 mengalami rusak total.

“Seyogyanya pemerintah kabupaten dan pemerintah kota bertanggung jawab penuh merehabilitasi kerusakan itu, tetapi pemerintah pusat memahami bahwa tidak semua daerah otonom memiliki kemampuan fiskal yang baik untuk mengalokasikan dana perbaikan,” kata Hamid.

Jika mengacu kepada pijakan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber-sumber lainnya, bahan habis pakai, serta

perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Tetapi nyatanya urutan ideal tersebut tidak segaris dengan kondisi yang ada di lapangan termasuk di antaranya menyangkut kualitas bangunan dan ruang kelas yang menjadi unsur penting proses pembelajaran. Untuk memenuhi penyediaan sarana dan prasarana tersebut diperlukan penyediaan dana, baik yang berasal dari APBN, maupun APBD. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemerintah pusat yang dalam hal ini Kemendikbud mengalokasikan anggaran dan memberikan

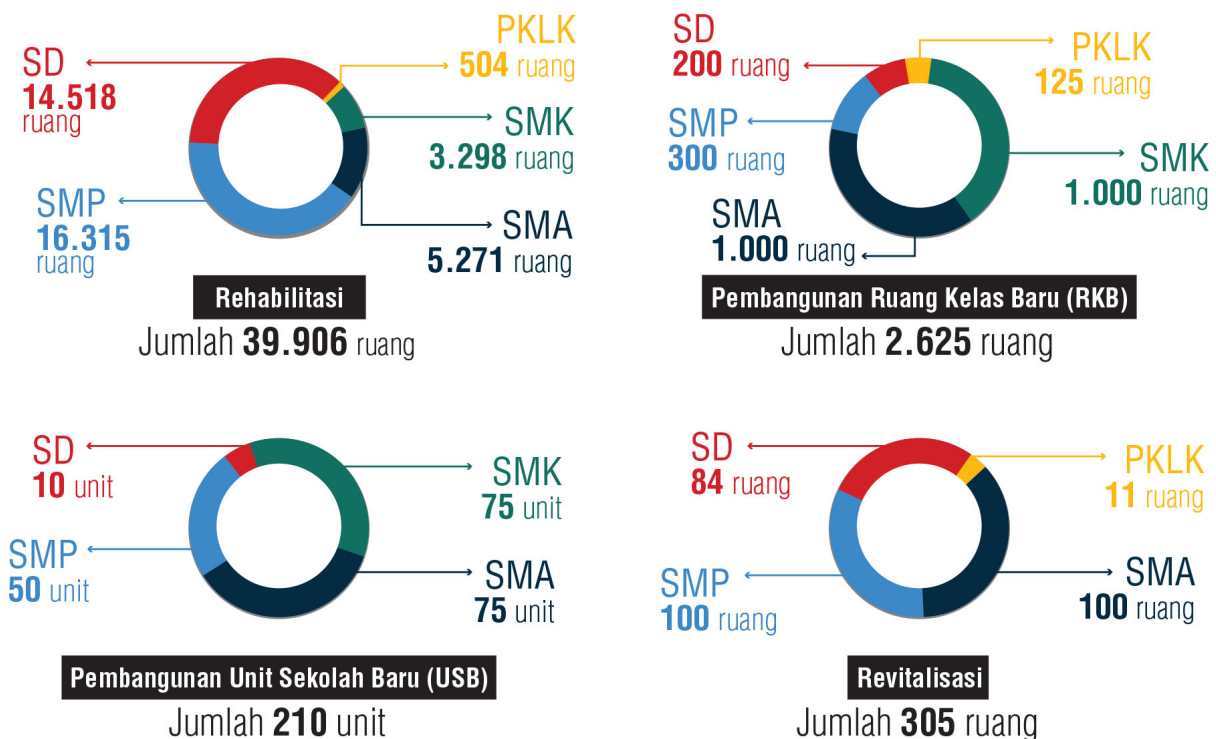
bantuan untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan itu hingga diharapkan 45.227.193 peserta didik yang tersebar di seluruh Indonesia tidak mengalami hambatan dalam proses pembelajaran.

Menurut Dirjen Dikdasmen, ruang kelas jenjang SMP saat ini hanya 99.777 buah yang dalam keadaan baik dari 349.351 ruang kelas yang ada, sementara 193.917 buah mengalami rusak ringan, 25.069 rusak sedang, 18.607 rusak berat dan 11.961 ruang kelas yang rusak total. Begitu juga jenjang SMA hanya 70.644 dari 153.703 ruang kelas yang dalam kondisi baik, sisanya 70.926 mengalami rusak

ringan, 5.648 rusak sedang, 3.656 rusak berat dan 2.829 mengalami rusak total.

Bangunan sekolah untuk jenjang SMK juga mengalami nasib yang sama. Dari 144.605 ruang kelas yang ada hanya 66.681 yang masuk kategori baik sementara 70.221 mengalami rusak ringan, 3.307 rusak sedang, 2.322 rusak berat dan 2.074 mengalami rusak total. Tidak terlalu berbeda dengan Sekolah Luar Biasa, hanya 7.344 yang dalam kondisi baik dari 19.925 ruang kelas yang ada sedangkan 10.964 diantaranya rusak ringan, 830 rusak sedang, 458 rusak berat dan 329 ruang kelas mengalami rusak total.

Sasaran Peningkatan Akses Pendidikan



sumber: BKLM



Istimewa

Untuk mempercepat mengatasi kemelut sekolah rusak itu, Kemendikbud belakangan ini fokus kepada upaya penanganan bangunan yang sedang dalam kondisi rusak total, rusak berat, dan rusak sedang dengan asumsi bahwa bangunan yang dalam kondisi rusak ringan masih bisa untuk sementara bertahan walaupun nantinya bakal menular masuk kepada kondisi rusak sedang dan seterusnya.

“Dari pengalaman di lapangan, setidaknya tiap tahun hampir sepuluh persen rata-rata bangunan yang ada mengalami perubahan (turun) kualitas,” tegas Hamid, menyingkap masih rendahnya antisipasi daerah memprediksi gejala tersebut walaupun kucuran dana dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) selalu

rutin diberikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota.

Tidak hanya menyentuh kepentingan peserta didik, belakangan ini banyak sekolah tidak memiliki ruang bagi kepala sekolah dan guru tetapi campur aduk dengan murid di ruang kelas. Karena itu, pemerintah juga fokus untuk mengatasi kendala tersebut yang nantinya secara bertahap sudah dapat teratasi sebagaimana tuntutan dari kehendak peraturan pemerintah itu.

Untuk ruang kepala SD, hanya tersedia 75.172 buah, sedangkan 72.331 lainnya belum tersedia sama sekali. Begitu pula ruang kepala SMP hanya tersedia 28.800 buah, sedang 8.963 lainnya belum tersedia, ruang

kepala SMA tersedia 10.183 buah dan 2.961 belum tersedia, SMK 8.718 buah dan 4.518 buah belum tersedia sedangkan untuk Sekolah Luar Biasa hanya tersedia 416 ruang dan membutuhkan 1.654 ruang lagi untuk ruang kepala sekolah.

Ia tidak menutup mata tentang masih banyak keterbatasan dalam menunjang proses belajar mengajar, termasuk diantaranya penyediaan fasilitas laboratorium seperti laboratorium komputer, fisika, kimia, biologi, bahasa, IPS, dan laboratorium IPA yang nantinya juga tidak luput dari perhatian pemerintah.

Selama ini masih banyak adanya asumsi keliru dari masyarakat luas tentang penanganan dunia pendidikan seolah-olah hanya dipikul



Istimewa

pemerintah pusat yang dalam hal ini Kemendikbud semata, padahal sejak era otonomi sudah diberikan kepada daerah serta kementerian dan lembaga perintah lainnya. Ini tercermin dari alokasi dana pendidikan yang mana amanah UUD 1945 mewajibkan 20 persen dari total APBN disisihkan untuk membiayai kepentingan pendidikan.

“Jadi kalau ada bangunan sekolah dasar yang rusak, maka kesempatan pertama adalah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota,” kata Hamis meluruskan kesalah asumsi itu.

Tahun anggaran 2016 lalu, alokasi dana pendidikan sebesar Rp 419 triliun atau 20 % dari jumlah APBN sebesar Rp 2.095 triliun. Alokasi

dana pendidikan tersebut dibagi-bagi seperti alokasi dana yang ditransfer kepada daerah sebesar Rp 267 triliun kemudian diserahkan kepada kementerian dan lembaga pemerintah sebesar Rp 146.288 triliun. Alokasi dana pendidikan yang dikelola Kemendikbud hanya sebesar 49 triliun atau hanya sedikit lebih besar jika dibanding alokasi dana pendidikan yang dikelola Kementerian Agama sebesar 46 triliun, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Rp 39 triliun dan 10 triliun untuk kementerian dan lembaga lainnya.

Lalu, ke mana saja dana yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disalurkan? Sebagai gambaran, alokasi dana Kemendikbud untuk tahun 2017 masing-masing

didistribusikan untuk triliun kepentingan pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 45,1 triliun, kemudian untuk BOP-PAUD sebesar Rp 3,5 triliun, Tunjangan Profesi Guru Rp 55,6 triliun, Tambahan Penghasilan Guru Rp 1,4 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 147,8 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Rp 6,1 triliun dan alokasi untuk dana Tunjangan Guru Daerah Khusus 1,7 triliun.

Selama ini kewajiban daerah sebagaimana amanah Undang-Undang untuk mengalokasi dana 20 persen dari APBD belum berjalan mulus dengan berbagai alasan dan kendala yang dihadapi daerah otonom masing-masing termasuk alasan lemahnya pertumbuhan fiskal di daerah. ■ (Emte)

Laporan Khusus

Kutipan :

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2008
TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN
Biaya Investasi Lahan Pendidikan
Pasal 7**

- (1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal mau pun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal mau pun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran daerah.
- (3) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal mau pun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (4) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal mau pun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (5) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas inisiatif Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.
- (6) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas usulan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.
- (7) Tanggung jawab pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.
- (2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;

- d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain
- (2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
 - (3) Anggaran biaya investasi lahan satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BAB III

**TANGGUNG JAWAB PENDANAAN PENDIDIKAN OLEH
PENYELENGGARA ATAU SATUAN PENDIDIKAN YANG
DIDIRIKAN MASYARAKAT**

Pasal 32

- (1) Lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan pendidikan, baik formal mau pun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi untuk lahan satuan dan/atau program pendidikan, baik formal mau pun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:
 - a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. orang tua atau wali peserta didik;
 - c. masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didik;
 - d. Pemerintah;
 - e. pemerintah daerah;
 - f. pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah.
- (2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Menteri Agama sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah

sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.

- (4) Investasi lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BAB IV

Tanggung Jawab Peserta Didik, Orang Tua, dan/atau Wali Peserta Didik

Pasal 47

Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas:

- a. biaya pribadi peserta didik;
- b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal mau pun non formal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
- c. pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal mau pun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
- d. pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal mau pun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan
- e. pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pendanaan Pendidikan oleh Masyarakat di luar Penyelenggara dan Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat serta Peserta Didik atau Orang Tua/Walinya

Pasal 49

- (1) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
- (2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diaudit oleh akuntan publik, diumumkan secara transparan di media cetak berskala nasional, dan dilaporkan kepada Menteri apabila jumlahnya lebih besar dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN

Pasal 50

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 51

- (1) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran pemerintah daerah;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (3) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
 - a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/ walinya;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan pemerintah daerah;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/ atau g. sumber lainnya yang sah.
- (4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari:
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. bantuan pemerintah daerah;
 - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.
- (5) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:
 - a. bantuan pemerintah daerah;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang- undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.



SOSOK HINDUN BASRI PURBA: KOMANDAN TERDEPAN MENOLAK GRATIFIKASI

Tidak mudah memelihara suasana moral Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pengawasan seperti Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tetap teguh pada pendirian, berani jujur menolak segala bentuk penyimpangan berbau korupsi, termasuk menolak gratifikasi.

Salah seorang yang dikenal sebagai komandan berdiri paling depan mengawal semua itu adalah Hindun Basri Purba, Sekretaris Itjen Kemendikbud yang selama ini tanpa lelah selalu berkeliling menyuarakan betapa pentingnya membangun integritas di kalangan Pegawai Negeri Sipil untuk tidak melakukan tindakan tak terpuji.

“Walaupun banyak tantangan, tetapi upaya membangun kepribadian yang bersih bagi segenap auditor Itjen harus tetap tegak,” katanya, menunjukkan sesuatu ide sederhana menulis “tolak gratifikasi” di setiap gantungan *ID Card* pegawai Itjen sebagai pesan tegas untuk membuktikan bahwa setiap pengawas (auditor) harus jujur.

Berdiskusi dengan sang-komandan yang satu ini ternyata mengasyikkan dan mudah akrab karena

cara dan gaya bicara yang selalu blak-blakan, *to the point*, dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan jika menyangkut sesuatu kebaikan. Misalnya, soal pembinaan PNS di lingkungan Itjen yang selalu dia kawal dengan penuh tanggung jawab, tegas namun tidak mengenyampingkan soal rasa kemanusiaan.

Dalam pergaulan dunia kerja, ia memiliki filosofi tersendiri yaitu selain fokus kepada pekerjaan juga harus gesit akal, gesit pergaulan, dan gesit untuk turun tangan menyelesaikan masalah hingga akhirnya akan terbentuk sebuah kecerdasan dalam menuntaskan pekerjaan.

Berbagi pengalaman tentang alur kehidupan, Hindun Basri Purba tidak merasa malu menceritakan masa kecilnya hidup di sebuah desa yang jauh dari kota yang tiap hari turun ke sawah membantu orang

tua atau harus merantau ke Jakarta dengan bekerja serabutan asalkan bisa bertahan untuk hidup dan bisa berkuliah.

Menjelang menjadi PNS, banyak pekerjaan yang pernah dilakukannya dari mulai tukang tambal ban, jadi sopir oplet, juga sekretaris redaksi di majalah Detik. “Intinya harus jujur, dan kita yakin pasti Tuhan akan menolong kita dari segala bentuk kesusahan apa pun,” katanya.

Di hari-hari terakhir masa baktinya kepada institusi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pria asal tanah Batak ini selalu menitipkan pesan khusus kepada generasi penerusnya untuk selalu memahami makna tanggung jawab. “Jangan seolah heboh di awal, tetapi hasil akhirnya nihil,” ungkapnya. ■ (Emte)

Hindun Basri Purba

Lahir di Pakkat, 6 Agustus 1957

Istri: Mardiana Br Simbolon (almh)

Masa kerja sebagai PNS selama 28 Tahun 6 bulan

Pendidikan

- a. SMA 2, Medan
- b. Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya
- c. Magister Ilmu Administrasi, Universitas Moestopo Beragama

Riwayat Jabatan

- a. CPNS Oktober 1989
- b. Kasubbag Inventarisasi pada Bagian Inventarisasi dan Penghapusan, Biro Perlengkapan Setjen (1993-1997)
- c. Kasubbag Penghapusan pada Bagian Inventarisasi dan Penghapusan, Biro Perlengkapan Setjen (1997-1999)
- d. Kabag Inventarisasi dan Penghapusan pada Biro Perlengkapan, Biro Umum Setjen (1999-2002)
- e. Kabag Inventarisasi dan Pendayagunaan, Biro Umum Setjen (2002-2006)
- f. Kepala Bagian Perlengkapan, Setjen (2006-2009)
- g. Kepala Biro Umum, Setjen (2009-2011)
- h. Sekretaris Inspektorat Jenderal (2011-Agustus 2017)
- i. Pangkat Terakhir IV/E

Pendidikan dan Pelatihan

- a. Prajabatan Tingkat III, Depdikbud, Jakarta, (1990)
- b. Diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (Diklat SPAMA) Angkatan XXXVII, Jakarta (1997)
- c. Diklat Pimpinan Tingkat II Angkatan XXII, LAN Makassar, Sulsel (2008)

Penugasan Lain

- a. Koordinator Tim Inventarisasi Aset Kemendikbud (2006)
- b. Ketua Tim Perhitungan Nilai Kekayaan Negara yang Tertanam pada 7 PTH BH (UI, UGM, UPI, IPB, ITB, UNAIR, dan USU) (2007)

- c. Ketua Tim Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik (2008)
- d. Ketua panitia penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal (2009)
- e. Ketua Seksi Penyelenggara Rembuk Nasional Pendidikan (2009,2010, 2011)
- f. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Internal (2010)
- g. Pengarah Tim Kerja Reformasi Birokrasi Internal Pusat (2011)
- h. Ketua Dewan Pengawas PK. BLU Universitas Mulawarman (2012 - 2016)
- i. Kuasa Pengguna Anggaran pada Itjen Kemendikbud (2011 - Agustus 2017)
- j. Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemendikbud (Koordinator Asesor Inspektorat Jenderal) (2013)
- k. Penanggungjawab Tim Penilai Kerugian Negara (TPKN) di lingkungan Kemendikbud (2014)
- l. Koordinator Asesor Program RBI di lingkungan Itjen (2014 Agustus 2017)
- m. Pengarah Gugus Tugas Penghematan Energi dan Air (2014)
- n. Ketua Sub KORPRI Unit Itjen (2014)
- o. Penanggungjawab Tim Pemantauan Kepatuhan Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kemendikbud (2015)
- p. Narasumber di sejumlah satuan kerja Kemendikbud (2012-Agustus 2017)
- q. Ketua Tim Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen (2012-2015)
- r. Ketua Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemendikbud (2012-Agustus 2017)
- s. Koordinator LHKPN di lingkungan Kemendikbud (2012-Agustus 2017)
- t. Penanggung Jawab Majalah Forwas (2012 - Agustus 2017)
- u. Pengarah Radio Itjen Kemendikbud (2012 - Agustus 2017)

Penghargaan

- a. Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya 10 Tahun (2004)
- b. Piagam Penghargaan Kepala LAN RI (2008)
- c. Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya 20 Tahun (2016)

INSPIRASI DI UJUNG PEMATANG

Horas ma di hita saluhutna. Tarnulobi manjalo maaf majolo hami tu hamu akka natua-tua nihuta, molo adong nasalah dipambahanan nami. Manganju ma hamu ate amang dohot hamu inang, alana hami lantang do mambagi turi-turian on.....

Pertama-tama kami mohon maaf kepada tua-tua adat, bila ada kata-kata kami yang salah atas perbuatan kami. Mengertilah akan tindakan kami ya bapak-ibu, karena telah lancang membagikan sebuah tulisan ini.

Pagi itu, butiran embun masih menjuntai dihujung daun padi sambil menanti datangnya sang matahari. Sementara dari kejauhan suara burung dan satwa liar lainnya bersahut-sahutan menghidupkan suasana desa Pakkat yang damai, ramah dan penuh kekeluargaan. Desa ini hampir-hampir tidak terlalu terkenal karena jauh terpencil 350 kilometer dari pusat kota Medan di Provinsi Sumatera Utara.

Diantara kerumunan warga desa yang bersiap turun ke sawah, terdapat anak lelaki bertubuh kurus

bergelayut manja dengan ayahnya sambil melantunkan lagu Batak bernada semangat bak seorang pejuang yang siap mengarungi medan perang. Anak itu kemudian dikenal bernama Hindun Basri Purba, anak yang ditempa menjadi matang melebihi ukuran usianya yang masih duduk di Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar).

Peristiwa seperti itu selalu saja berulang dari hari ke hari, minggu ke minggu dan terus berulang dari tahun ke tahun. Selain aktivitas bersekolah di kampung yang sunyi





Profil

dari hiruk pikuk suasana kota, sang anak selalu terlihat bergulat dengan lumpur di tengah sawah atau sesekali terlihat memancing ikan di pinggir sungai yang waktu itu masih mengalir jernih membelah kampung Pakkat tak jauh dari kawasan legendaris Barus.

Tak terlihat kejenuhan, apalagi merasa capek dalam bekerja menggarap sepetak sawah milik keluarga Purba. Keluarga sederhana yang kemudian dikenal menjadi panutan masyarakat Pakkat yang saat itu mayoritas dihuni etnik Batak di Tapanuli Utara.

Dari hidup keseharian, Hindun Basri Purna sudah terlihat karakter kuat sebagai seorang *leader* sedikit-tidak-tidaknya selalu tampil sebagai pemimpin dari kawan-an anak-anak kampung Pakkat termasuk menjadi ketua kelas sejak Sekolah Rakyat sampai Sekolah Menengah Atas.

Pagi itu suasana kampung sepi sekali, sementara Hindun Basri Purna tetap turun ke sawah menunggu padi yang sedang menguning. Sesekali dia berhenti di ujung pematang sambil berteriak mengusir kawan-an burung pipit yang bakal memangsa butir padi. Ujung pematang itu selalu menjadi tempat kesukaannya untuk melepaskan lelah dan kemudian di ujung pematang itulah titik balik dari impian hidup yang akhirnya menjadi alur kehidupan Hindun Basri Purba berikutnya.

Nasihat sang ayah yang mengutip tuntunan agama “Allah tidak mengubah sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri” selalu mengiang-ngiang ketika dia berada di ujung pematang itu. Semangat hidup selalu bangkit, walaupun

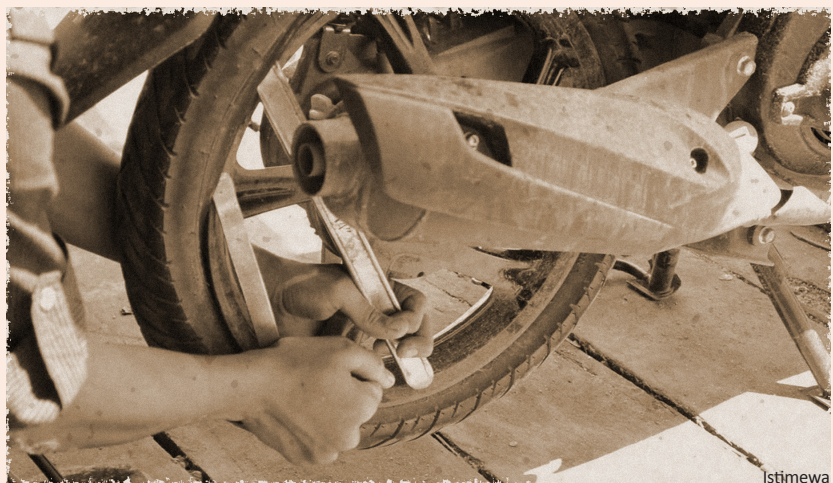
suasana kehidupan keluarganya yang miskin selalu menjadi tantangan nyata dalam hidupnya. Secara matematis tidak mungkin keluar dari kungkungan kemiskinan itu, apalagi bermimpi seperti anak-anak lain yang bisa bersekolah tinggi. Sang ayah hanyalah berprofesi seperti tukang servis jam dengan latar belakang pendidikan setingkat sekolah menengah, sementara sang ibu hanyalah ibu rumah tangga biasa yang kebetulan buta huruf.

Dalam tradisi keluarga Batak, anak lelaki harus memikul tanggung jawab lebih besar dibanding anak perempuan. Karena itulah, kedua orang tuanya sejak awal menempa Hindun Basri Purba untuk menjadi

hingga dewasa, dari skala kecil di kampung halamannya, pemimpin masyarakat adat, hingga kemudian menjadi salah satu pemimpin di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Aktivitas keseharian selama beradaptasi di Jakarta, dikenal mudah akrab dengan masyarakat sekitar, hingga tidak mengherankan jika pernah menjadi Sekretaris RW di Utan Kayu Utara, Jakarta Timur, juga aktif di organisasi Perserikatan Sepakbola Garuda Sakti Jakarta Utara sebagai Manajer merangkap Sekretaris.

Sebagai anak laki-laki, ia juga mengambil alih peran orang tua untuk membimbing adik-adiknya



pionir, menjadi lelaki tahan banting untuk kemudian menjadi seorang pemimpin setidaknya untuk mengayomi keluarga.

Lahir 6 Agustus 1957 dari tujuh bersaudara, sebagai anak kedua dan menjadi anak laki-laki pertama dari pasangan keluarga Ramudin Purba dan Nurhaniah Sihotang, Hindun Basri Purba seakan ditakdirkan untuk menjadi pemimpin sejak kecil

menjadi orang terpelajar. Misalnya, adik perempuannya Martini Purba, S.E. yang selalu dibimbingnya hingga menjadi anggota DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan 2 periode sampai saat ini.

Bekerja membantu orang tua merupakan bentuk pengabdian yang sulit dilukiskan dengan kata-kata selain sambil sekolah dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,



Istimewa

hingga Sekolah Menengah Atas kelas satu menjelang memasuki era perantauan ke kota Medan.

Sebuah dorongan luar biasa dalam memotivasi hidupnya, khususnya datang dari kedua orang yang secara bersahaja menginginkan putera-puterinya menjadi “orang”. “Biarlah aku hanya bersekolah rendah, tapi kau harus bersekolah lebih tinggi lagi,” demikian kalimat sederhana yang selalu memacu dirinya untuk terus menimba ilmu.

Kehidupan keluarga yang serba susah saat itu, memaksa seluruh anggota keluarga untuk *move-on* untuk mencari kehidupan lebih baik. Sang ayah mencoba kembali ke bangku sekolah selain melaksanakan profesinya sebagai tukang servis jam atau pekerjaan serabutan lainnya asalkan dapat menopang kehidupan keluarga. Mengikuti ujian persamaan sambil mendalami ilmu-

ilmu agama, hingga akhirnya sang ayah diberi kepercayaan menjadi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakkat.

Nasib pun mulai sedikit berubah, satu demi satu keluarga Purba menata kehidupan baru. Seperti kegiatan sang ibu sudah bisa lebih fokus berjualan, anak-anak bersekolah dengan baik dan sang ayah menggeluti wiraswasta selain keseharian sebagai pejabat KUA, tidak terkecuali menata masa depan anak lelaki yang selama ini menjadi andalan keluarga mewujudkan impian mencari sekolah yang lebih baik di kota.

Menjelang pergi ke perantauan di Medan, Hindun Basri Purba lebih banyak mendalami serta mencerna segala nasihat yang disampaikan oleh kedua orang tuanya tentang makna kehidupan dalam upaya mengubah nasib di masa

datang. Makna merantau misalnya, untuk ukuran seusia seorang remaja terkadang menjadi perdebatan batin untuk memilih apakah tetap tinggal bersama orang tua yang relatif lebih nyaman dibanding harus memilih berspekulasi dalam kehidupan baru yang serba belum diketahuinya kendati tradisi “orang Batak” pada umumnya dikenal sebagai salah satu etnik perantau tangguh.

Perantau Batak pada umumnya memiliki target tunggal yaitu harus sukses di perantauan sesuai filosofi “pantang pulang sebelum jadi orang” yang maksudnya tidak akan pulang ke kampung halaman sebelum meraih sukses di perantauan. Ukuran sukses bagi perantau Batak antara lain apa yang disebut dengan istilah *hamoraon* yang diukur dengan bentuk kekayaan materi, *hagabeon* yang diukur dengan bentuk kesuksesan berketurunan

Profil

dan *hasangapon* yang diukur dalam bentuk kehormatan.

Hindun Basri Purba sudah meyakini tantangan nyata untuk bertekad pantang pulang kampung kalau belum sukses atau setidaknya harus lebih baik secara materi dari kerabat atau teman-temannya yang tidak merantau. Karena itulah, tidak ada pilihan kecuali harus belajar dan bekerja keras untuk memenuhi tuntutan itu.

Adat istiadat dan budaya Batak sejak dahulu kala memiliki perbedaan dengan adat istiadat dan budaya etnik lainnya di Indonesia, terutama dari sisi praktik adat istiadat, kekerabatan, bahasa, kesenian, kepercayaan, serta tidak kalah juga prinsip orang Batak itu sendiri. Orang Batak memegang teguh prinsip hidup, walaupun bagi suku lain hanya melihat kulit luarnya seperti gaya bicara atau bentuk fisik lainnya.

Walaupun bersekolah rendah, tetapi orang tuanya selalu menanamkan prinsip hidup bagi Hindun Basri Purba untuk selalu dipegang teguh dalam kehidupan kelak. Orang tuanya selalu menanamkan prinsip *Anakkonhido Hamoraon diau* yang maksudnya anakku adalah kekayaanku, karena anak adalah segalanya bagi orang Batak. Memiliki anak adalah sebuah kekayaan yang tidak ternilai. Apalagi anak itu akan bernilai lebih jika anak itu adalah laki-laki apalagi jika anak sulung, ini ibarat sebuah berkat yang sangat besar bagi keluarga suku Batak. Anak laki-laki nantinya akan menjadi pewaris marga dari orang tua laki-laki.

Sang ayah juga mengingatkan prinsip *Hagabeon, Hasangapon,*

Hamoraon yang maksudnya menyangkut kesuksesan, kehormatan, dan kekayaan. Hidup sukses yang dihormati serta terpandang karena kekayaannya merupakan dambaan bagi orang Batak. Hal ini adalah ukuran keberhasilan dalam hidup orang Batak. Menjadi berhasil itu harus sukses, kaya, dan dihormati. Sukses yang dimaksud bisa berupa sukses dalam bidang pendidikan, usaha, berkarier, dan lain-lain. Kehormatan dalam suku Batak digambarkan dalam pergaulan sehari-hari, yaitu ketika bergaul selalu santun, memiliki jabatan sosial yang tinggi dalam pergaulan mau pun dalam adat.

Ukuran kekayaan dalam suku Batak itu relatif, tergantung cara kita membandingkan dan memaknainya. Orang Batak kaya jika semakin banyak memberi kepada orang lain, maka semakin banyak pula yang akan membalaskan pemberian itu kepadanya, begitu juga sebaliknya. Jadi hidup orang Batak itu penuh dengan pemberian dan penerimaan berkat.

Penanaman prinsip bagi seorang anak lelaki juga sering dituturkan sang ayah kepada Hindun Basri Purba yakni tidak akan menikah sebelum hidup mapan. Menikah tanpa hidup mapan adalah tabu. Menjelang memasuki fase pernikahan bagi orang Batak diharuskan hidup mapan, baik bagi laki-laki mau pun perempuan. Karena itulah pada masa lalu tidak mengherankan jika ditemukan perawan tua dan perjaka tua di suku Batak karena tuntutan yang satu ini. Selain itu, tuntutan hidup mapan agaknya berkolerasi positif dengan biaya pernikahan karena biaya yang dikeluarkan untuk

pernikahan orang Batak itu tidak sedikit, jauh lebih banyak dari pernikahan suku lain pada umumnya.

Prinsip *Dalihan Natolu*, yang memayungi *Somba marhula-hula, Elek Marboru, Manat Mardongan Tubu*. Ini adalah prinsip yang terbi-lang sakral bagi suku Batak karena di setiap adat dan acara Batak pasti kata-kata ini selalu diucapkan. *Dalihan Natolu* artinya tiga aturan utama yang harus dipatuhi sebagai orang Batak, yaitu *Somba Marhula-hula* yang maksudnya selalu hormat kepada keluarga pihak istri, *Elek Marboru* yaitu harus bisa mengayomi wanita, dan *Manat Mardongan Tubu* yaitu bersikap hati-hati kepada teman semarga.

Tanpa *Dalihan natolu*, hidup orang Batak tidak akan memiliki kekerabatan yang erat seperti sekarang ini. *Dalihan natolu* juga sebagai fundamentalisme kehidupan yang sebenarnya selaras dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh Pancasila sebagai falsafah negara.

Harta boleh miskin, tetapi adat tetap kaya, demikian nasihat yang selalu terngiang di telinga ketika orang tuanya menanamkan prinsip sekaligus penyemangat dalam kehidupan mendatang. Adat adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Jika seseorang dikategorikan sebagai orang miskin dalam hal ekonomi, belum tentu dia memiliki status yang sama dalam hal adat. Sering kali terjadi seorang raja di adat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, dan orang yang mampu secara ekonomi harus menghormati raja adat tersebut dengan mengesampingkan status ekonomi.

Sebagai orang tua yang taat

beragama Islam di tengah warga kampung Pakkat yang mayoritas beragama non-Islam, sang ayah selalu mengulang tentang prinsip “Apa pun yang kau kerjakan asal halal” nampaknya menjadi panduan yang tidak bisa ditawar.

Prinsip ini tidak mengherankan jika ditemukan banyak orang orang Batak yang berprofesi sebagai sopir angkot, pegawai, sopir angkot metromini atau mikrolet, tukang tambal ban, tukang las atau tukang ojek sekalipun tidak menjadi beban masalah personal asalkan yang penting halal dan tidak merugikan orang lain. Berhubungan dengan prinsip tersebut, lebih sederhana bisa dimaknai lebih baik mandi keringat halal daripada pengangguran sebab pengangguran adalah sebuah

hal yang tabu di muka orang Batak apalagi menjadi pengemis.

Hindun Basri Purba yang dikenal kawan sebayanya sebagai seorang *leader*, sebelum merantau diberikan alur bertindak sebagaimana seorang kesatria sejati. “Biar kambing di kampung sendiri, tapi banteng di perantauan,” demikian seuntai kalimat yang selalu dide-ngarnya dari sang ayah.

Istilah tersebut maksudnya adalah di kampung halaman sendiri boleh diabaikan, tapi jangan di perantauan. Biarlah di kampung diremehkan atau dilecehkan, tetapi ketika di perantauan tidak ada alasan untuk menerima hal yang sama. Banyak orang Batak yang sukses karena motivasi ini, dulu menelan hidup pahit di kampung, kemudian

mengecap manisnya rasa sukses di negeri orang.

Menjelang pergi meninggalkan kampung halaman, kedua orang tuanya juga menyingkap makna marga bagi kehidupan etnik Batak. Marga dalam budaya Batak kadang-kadang bisa mengubah nasib karena marga adalah identitas utama bagi orang Batak.

Begitu pula menyangkut persoalan seni yang bagi orang batak merupakan salah satu prinsip yang sama pentingnya. Musik bagi orang Batak adalah obat stres di kala duka sekaligus pelipur lara tatkala rindu akan orang tua, sanak keluarga, dan kampung halaman yang ditinggalkan nan jauh di sana. ■ (Emte)



Istimewa



Istimewa

BERMULA DARI KOTA MEDAN

Jiwa pemberani serta berkarakter kuat untuk selalu menjadi pemimpin sudah teruji ketika masih berada di kampung halamannya Desa Pakkat yang dahulu masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Utara dan kini menjadi daerah otonomi baru menjadi Kabupaten Kumbang Hasudutan. Bagaimana cara berkelahi, bagaimana cara “menjinakkan” keberandalan kawan sebaya, bagaimana cara memancing ikan, bagaimana cara bercocok tanam, dan bahkan bagaimana cara hidup mandiri tanpa harus di bawah bayang-bayang orang tua yang kebetulan oleh masyarakatnya digelar raja.

Bekal kekuatan batin serta tekad bulat untuk menjadi orang itulah menguji Hindun Basri Purba untuk kemudian harus mampu beradaptasi di sebuah tempat kehidupan baru yakni kota Medan. Medan saat itu adalah kota tantangan sekaligus kota pijakan bagi perantau Batak sebelum melanglang buana ke penjuru negeri lainnya. Atau

Medan juga sering dijadikan sebagai arena pertarungan bagi perantau untuk berhasil...atau lebur.

Kota Medan bagaikan “kawah candra di muka” karena di situlah diuji segalanya. Selama dua tahun tinggal di kota medan bersamaan dengan studi di kelas dua dan kelas tiga SMA Negeri 2 Medan, sangat

terasa gelombang ujian selalu berada di depan mata. Diuji kesabaran, diuji kepintaran, diuji kedewasaan dan yang paling diingat adalah diuji untuk siap sukses dan siap gagal.

Masih membekas dalam ingatan, ketika orang tua dan keluarga melepas kepergian merantau ke kota Medan itu, hanya berbekal

sedikit beras hasil panen serta hasil kebun sendiri. Kemudian sanak keluarga mengantar hingga naik kendaraan jurusan Medan. Waktu itu transportasi darat sangat sulit dan kondisi jalannya pun masih hancur. Tidak jarang jarak tempuh antara Pakkat ke Medan bisa berlangsung satu hari atau dua hari tergantung cuaca dan kondisi kendaraan.

Sempat terbesit rasa takut ketika berada di atas kendaraan yang berguncang hebat sambil berjalan perlahan, beliuk-liuk, serta menari-nari mengikuti kontur jalan tanah yang kadang-kadang berada di bibir jurang mengerikan. Tidak jarang di antara sesama penumpang bercerita tentang nasib nahas yang selalu menyisakan cerita perjalanan membelah punggung pegunungan Bukit Barisan itu. Untungnya sang sopir selalu berusaha meredam rasa ketakutan para penumpang dengan sesekali melantunkan lagu-lagu Batak atau bersenda gurau dengan humor kocak.

Sebagai tempat perantauan baru, kota Medan masih terasa asing karena selama ini hanya mendengar dari cerita warga kampung yang pernah ke Medan. Jika dibanding desa Pakkat, Medan dalam imajinasinya bagaikan sebuah tempat yang jauh berbeda bagai langit dan bumi. Medan bagaikan kota besar yang dihuni orang-orang kaya, terpelajar dan orang sukses. Sebelum berangkat, orang tua sudah memberikan alamat tujuan ke rumah famili di Jalan Rakyat Medan.

Medan sebagai ibukota provinsi Sumatera Utara, sebenarnya sebelum merdeka sudah dikenal dunia setelah terjadi perkembangan

sangat pesat tahun 1905 bersamaan dengan dibuka lahan perkebunan tembakau secara besar-besaran. Kualitas tembakau Medan saat itu merupakan tembakau terbaik di antara perkebunan tembakau yang ada di beberapa belahan dunia. Fakta sejarah tersebut setidaknya dapat dibaca dalam buku terbitan 1909 berjudul, *Twentieth Century Impressions of Netherlands India*, sebuah buku sejarah pertanian di tanah jajahan kolonial yang melukiskan pengakuan dunia tentang tembakau Deli asal Sumatera Utara. Dari tembakau itulah nama Medan mencuat namanya selain Batavia atau Soerabaja.

Keharuman nama Medan setidaknya terpatri dalam dunia industri komoditas tembakau yang saat itu produk daun pembungkus rokok Sumatera menempati ranking

memadai lagi sehingga para pemilik perkebunan terpaksa mendatangkan tenaga kerja kontrak dari Pulau Jawa yang kemudian beranak-pinak menjadi generasi dengan istilah Jawa Deli (Jadel).

Bagi Hindun Basri Purba, Medan adalah pijakan awal untuk meraih sukses di kemudian hari walaupun dalam kehidupan keseharian awalnya terasa pahit. Lantaran menumpang hidup bukan dengan orang tua sendiri, harus ikhlas bersikap tulus untuk mengerjakan apa saja yang diminta tuan rumah. Sebelum berangkat kesekolah, pagi-pagi buta harus melakukan pekerjaan tetek bengek di rumah seperti mengepel, mencuci, menimba air, atau apa saja yang bisa dilakukan. Kemudian ke sekolah pun harus jalan kaki hingga terkadang terasa capek sebelum masuk kelas. Sebagai



Istimewa

tertinggi dan selalu digunakan dalam produk rokok mewah di pasar internasional. Saking pesatnya perkembangan perkebunan tembakau di Sumatera Utara, kebutuhan tenaga kerja lokal sudah tidak

seorang anak yang beranjak remaja, tak sedikit pun memperlihatkan rasa gengsi jika membandingkan siswa lain yang umumnya memiliki latar belakang keluarga berada. ■ (Emte)

Pembacaan naskah sambutan Presiden RI oleh Pembina Upacara, Hilmar Farid. (Fajar)



Itjen Kemdikbud

PERINGATI HARI LAHIR PANCASILA, KEMENDIKBUD GELAR UPACARA

Memperingati Hari Lahir Pancasila, sejumlah instansi pemerintah dan sekolah di seluruh Indonesia melakukan upacara. Upacara tersebut juga diadakan di Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Bertempat di halaman Kemendikbud yang diikuti oleh seluruh pegawai Kemendikbud dan Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid menjadi pembina upacara yang digelar pada Kamis (1/6) pagi.

Tujuan pelaksanaan upacara ini untuk menumbuhkan komitmen agar lebih mendalami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar ber masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Merujuk pada naskah sambutan Presiden RI Joko Widodo, Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatoken Ir. Sukarno, piagam Jakarta tanggal 2 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Adalah jiwa besar para *founding fathers*, para ulama, dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok nusantara sehingga kita bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan Indonesia.

“Namun, kehidupan bangsa



Itjen Kemdikbud

kita mengalami tantangan. Ke-bhinekaan kita sedang diuji dengan ancaman pandangan dan tindakan tentang kebhinekaan. Sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila menjadi masalah besar tatkala diperparah dengan penyalahgunaan media sosial yang menggaungkan *hoax* alias kabar bohong,” ujar Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid saat membacakan naskah sambutan Presiden RI.

Di akhir sambutan, Dirjen Kebudayaan mengajak untuk saling membantu menggapai cita-cita bangsa sesuai Pancasila dengan menjaga perdamaian, persatuan, persaudaraan yang bersikap santun, menghormati perbedaan dan saling



Itjen Kemdikbud

membantu demi kepentingan bangsa.

“Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita Indonesia. Kita Pancasila.

Semua Anda Indonesia, semua Anda Pancasila, Saya Indonesia, saya Pancasila,” tegas Hilmar menutup sambutannya. ■ (WNH)

UPAYA PENGUATAN RBI DAN WBK DI LPMP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka penguatan Reformasi Birokrasi Internal (RBI) dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Itjen pada hari Jumat, 9 Juni 2017 memberikan Sosialisasi dalam rangka penguatan RBI dan WBK di LPMP Provinsi Kaltim.

Dibuka oleh Kepala LPMP Provinsi Kaltim Bambang Utoyo, dihadiri pejabat struktural, widyaiswara dan pegawai di lingkungan LPMP Provinsi Kalimantan Timur. Hindun Basri Purba menjelaskan langkah-langkah penguatan RBI dan upaya pencegahan dalam rangka Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Kepala LPMP diharapkan dapat segera menindaklanjuti sosialisasi ini dengan membentuk Tim

WBK. Tim tersebut diminta mengisi kuesioner WBK dan menyampaikan ke Itjen Kemendikbud. ■ (ASB)

Itjen Kemdikbud





Itjen Kemdikbud

IRJEN SOSIALISASI PPDB BEBAS PUNGLI

Memasuki tahun ajaran baru, Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengantisipasi adanya pungutan liar dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem penerimaan siswa baru telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17/Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederhana.

Indikasi mengenai pungutan liar dalam sistem penerimaan siswa baru menjadikan Tim Saber Pungli intensif melakukan pengawasan di jenjang sekolah. Inspektur Jenderal Daryanto menganjurkan agar orangtua siswa tidak mengi-

kuti arahan dari pihak sekolah jika memang dianggap mengandung pungutan liar.

“Antisipasi pungli ini sebenarnya Kemendikbud sudah bekerja sama dengan Ombudsman dan juga KPK, mengingat Permendikbud no 17/Tahun 2017 bahwa PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru yang berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan juga tanpa diskriminasi,” jelas Irjen Daryanto saat *Live Dialog Semangat Pagi Indonesia* di Televisi Republik Indonesia (TVRI), Jakarta (12/6).

Tema yang diangkat dalam acara tersebut adalah “Penerimaan Siswa Baru & Antisipasi Pungli” yang juga membahas mengenai zonasi peserta didik. Ada pun

keterkaitan zonasi tercantum dalam Permendikbud No. 17/Tahun 2017 bahwa zonasi memberikan kemudahan kepada siswa untuk bersekolah sesuai wilayah atau daerahnya dan radius atau jarak kilometer akan disesuaikan oleh tiap-tiap Pemerintah Daerah.

“Karena setiap daerah itu berbeda-beda jaraknya sehingga sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan menetapkan jarak tersebut. Intinya, zonasi ini ditujukan kepada anak-anak kita agar tidak dipersulit dalam menimba ilmu menggunakan sarana pemerintah. Tentunya, hal ini bisa mendorong peningkatan akses layanan pendidikan Indonesia semakin baik,” ungkap Irjen. ■ (WNH)

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PROGRAM KEMENDIKBUD

Itjen Kemdikbud



Berempat di Gedung A Lantai 3 Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hari ini Selasa 13 Juni 2017, diselenggarakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan. Mendikbud Muhadjir Effendy didampingi Sekretaris Jenderal Didik Suhardi dan Inspektur Jenderal Daryanto.

Rapat dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II di lingkungan

Kemendikbud, serta para Kepala LPMP dan P4TK seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Muhadjir Effendy menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemendikbud terkait Ujian Nasional yang telah berjalan dengan tertib dan lancar pada Tahun 2017, tidak ada kecurangan-kecurangan UN seperti tahun sebelumnya.

Beliau juga menyampaikan ke depan Kemendikbud akan melakukan reformasi sekolah di lingkungan pendidikan, penerimaan siswa baru, peran guru terhadap reformasi, pembentukan karakter yang kuat dalam rangka mempersiapkan generasi baru abad 21, dan perubahan *mindset* guru serta tak kalah penting menjaga marwah institusi pendidikan. ■ (Aceel)

KEMENDIKBUD GELAR DISKUSI PENGUATAN KARAKTER MELALUI LIMA HARI SEKOLAH

Guna menunjang langkah strategis perbaikan sekolah di tahun ajaran baru bidang Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan diskusi pendidikan dengan tema “Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Lima Hari Sekolah” di kantor gedung A Kemendikbud Jakarta pada Rabu (14/6).

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Hamid Muhammad sebagai

narasumber. “Penguatan karakter melalui lima hari sekolah berdasarkan pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur tentang jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik,” ujarnya.

Menurut Hamid, peraturan lima hari sekolah dengan 8 jam belajar, akan diselenggarakan bertahap sesuai dengan kesiapan kepala dinas setempat. Aturan baru ini rencananya dimulai pada

Juli 2017, tetapi tidak berlaku atau tidak diwajibkan untuk pendidikan TK, PAUD, dan Sekolah Luar Biasa.

Tujuan dibentuknya peraturan lima hari sekolah adalah untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan perkembangan era globalisasi.

“Untuk tenaga kependidikan atau guru, proses pembelajaran peserta didik dapat ditingkatkan melalui ekstrakurikuler agar dapat mengembangkan potensi, bakat, kepribadian, dan kemandirian

Cuplikan Peristiwa



Itjen Kemdikbud

peserta didik,” kata Staf Ahli Mendikbud Bidang Pendidikan Karakter Ari Budiman.

Untuk tenaga kependidikan atau guru, hari sekolah dipergunakan untuk melaksanakan beban kerja guru, di antaranya, merencanakan pembelajaran, menilai hasil, melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas pokok.

Ada pun untuk mekanisme lima hari kerja, yang salah satunya mengatur tentang beban kerja guru, tertuang sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2017. ■ (YAN)

PESERTA TELAHAH SEJAWAT MENINGKAT, MARI CAPAI LEVEL 3 IACM

Menjadi *benchmarking* bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya merupakan salah satu tujuan dari pelaksanaan kegiatan telaah sejawat. Hal inilah yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud demi meningkatkan kualitas APIP, Itjen mengadakan Rapat Komite Telaah Sejawat di ruang sidang 6.1 Itjen Kemendikbud, Kamis (15/6).

Acara dihadiri oleh dua narasumber dari Kementerian Keuangan di antaranya Robert Gonijaya selaku Inspektur VII dan Auditor Ari Sufianto.

Pada tahun ini mengalami penambahan peserta yang terlibat dalam penelaah dan ditelaah, ketika tahun 2016 hanya terdapat 6 Kementerian sedangkan tahun 2017 bertambah sebanyak 16 Kementerian.

“Alhamdulillah, tahun ini mengalami penambahan Bapak Ibu, kalau tahun lalu kami hanya 6 Kementerian. Sekarang bertambah menjadi 16 Kementerian. Semoga ini bisa menguatkan peran APIP yang lebih berkualitas.” ucap Agam

Itjen Kemdikbud



Bayu selaku Kabag Hukum dan Kepegawaian Itjen Kemendikbud dalam pembukaan Rapat Komite Telaah Sejawat.

“Rapat komite telaah sejawat ini memastikan seluruh anggota AAPII bisa berada pada level standar. Karena ada unsur yang harus ditempuh, salah satunya terkait dengan IACM,” ungkap Irjen saat pembukaan Rapat Komite Telaah Sejawat.

Adapun tujuan lain dari penyusunan sasaran telaah sejawat adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian aktivitas dengan standar yang berlaku dan menjamin bahwa aktivitas APIP dapat mengikuti praktik terbaik yang ada.

“Dalam menentukan sasaran yang baik. Telaah sejawat tidak boleh secara resiprokal atau saling telaah. Karena hal ini bertujuan untuk meningkatkan independensi” jelas Robert mengenai waktu pelaksanaan pada telaah sejawat.

Ari Sufianto menambahkan dalam pelaksanaan telaah sejawat dilaksanakan tiap tiga tahun oleh tim Independen dan tentunya



Itjen Kemdikbud

berkualitas atau berkompeten yang berasal dari luar APIP.

Irjen Daryanto juga mengingatkan bagi anggota telaah sejawat yang belum mencapai level 3 agar segera mencapai di level tersebut. Harapan bersama bahwa telaah sejawat ke depan tidak terlalu kaku. Mengingat pengalaman tahun lalu yang sudah dilakukan agar dapat dievaluasi sehingga bisa dilihat bagaimana alurnya.

Selama proses telaah sejawat, waktu juga menjadi faktor yang

penting. Telaah yang dilakukan di salah satu Kementerian tidak boleh memakan waktu terlalu lama. Harus ada waktu standar yang mengatur penelaahan tersebut.

Ari Sufianto menjelaskan bahwa selanjutnya akan dilakukan bimbingan teknis pedoman telaah sejawat pada akhir bulan Juli. Telaah sejawat akan dilaksanakan sebanyak 2 gelombang yaitu Agustus dan September. ■ (WNNH)



Itjen Kemdikbud

Sebanyak 16 Kementerian di Indonesia yang hadir dalam Rapat Komite Telaah Sejawat 2017.

WORKSHOP CACM GUNA DETEKSI MASALAH RISIKO KEUANGAN & OPERASIONAL ORGANISASI

Inspektorat Jenderal Kemendikbud mengadakan *Workshop Continuous Auditing and Continuous Monitoring (CACM)* di Gedung Itjen Kemendikbud Jakarta, Jumat (16/06).

Hadir sebagai narasumber Inspektur Jenderal Daryanto dan Deputi Bidang Polhukam Slamet Sudarsono. *Workshop* juga dihadiri oleh beberapa pejabat eselon III dan auditor Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

Continuous Monitoring merupakan proses dan teknologi yang digunakan untuk mendeteksi kepatuhan dan masalah risiko yang terkait dengan lingkungan keuangan dan operasional organisasi. Lingkungan keuangan dan operasional terdiri dari SDM, proses,



Radio Itjen Kemendikbud/WNH

dan sistem yang bekerja sama untuk mendukung operasi yang efisien dan efektif.

“Pelaksanaan CACM memerlukan kesiapan, baik di sisi pengetahuan mau pun kesiapan mental,” ungkap Irjen Daryanto.

Secara garis besar, *Continuous Auditing* adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan efektivitas dan efisiensi RTA (*Real Time Accounting System*) dalam mengamankan aset, mempertahankan integritas data, dan menghasilkan informasi keuangan yang *reliable*. ■ (YAN/NHR/WDY)



Itjen Kemdikbud

HARI PERTAMA BEKERJA, LOBI ITJEN RAMAI PEGAWAI

Suasana ramai terlihat di Inspektorat Jenderal Kemendikbud ketika diadakan halalbihalal sekaligus silaturahmi antarpegawai Itjen di lobi Gedung B pada Senin (3/7) pagi. Setiap pegawai yang baru tiba di kantor dengan tertib mengikuti alur untuk bersalaman dengan pegawai lain yang sudah berjejer. Terlihat Inspektur Jenderal Daryanto berada di depan gedung untuk menyambut hangat para pegawai yang baru tiba. Setelah melaksanakan libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1438 H, pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk Inspektorat Jenderal memulai aktivitas pada

hari itu.

Tampak wajah ceria pegawai Itjen saat saling bersalaman, tetapi ada pula raut wajah lelah di antara mereka yang usai melaksanakan mudik lebaran. Seperti yang dikatakan Inspektur Jenderal Daryanto bahwa pascamudik lebaran, pegawai Itjen diminta untuk menjaga stamina agar tidak terlalu lelah dan tetap fokus dalam bekerja.

“Saya menyalami beberapa Bapak Ibu dan saya merasa ada yang berbeda. Tangan yang hangat pasti itu yang terlalu lelah. Berbeda dengan tangan yang bugar dan fit. Jadi, diharapkan agar Ibu Bapak memiliki istirahat yang cukup, jangan terlalu diforsir dulu. Agar

besok dan hari seterusnya dapat lebih fokus bekerja,” ucap Irjen.

Irjen Daryanto juga mengatakan bahwa momentum Ramadhan ini sangat baik untuk semua kalangan. Karena mengingat satu bulan penuh saat umat muslim berpuasa, ada nonmuslim juga yang ikut berpuasa. Tentu hal ini mengingatkan diri sendiri untuk saling toleransi.

“Dan juga Ibu Bapak perlu diketahui, usai Ramadhan ini pada waktu kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, semoga itu tidak hanya kata-kata. Tapi betul-betul dari hati kita. Agar hubungan silaturahmi kita tetap melekat,” pesannya. ■ (WNH)

Itjen Kemdikbud



PELAKU PENDIDIKAN PROVINSI RIAU BERIKRAR DUKUNG PPK



BKLM

Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang akan diterapkan pada tahun pelajaran baru 2017/2018, pelaku pendidikan Provinsi Riau yang diwakili oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru, Riau membacakan pernyataan Ikhar mendukung program PPK di tengah acara pembukaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) tahun 2017, di GOR Remaja Pekanbaru, Riau, Senin (03/07/2017).

Pembacaan pernyataan dukungan tersebut disaksikan 2.024 peserta dan pendukung penyelenggaraan OSN seluruh Indonesia, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman beserta jajarannya, Direktur Jenderal Dikdasmen Hamid Muhammad, beserta seluruh pejabat eselon dua di Ditjen Dikdasmen, seluruh kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia, serta para

kepala sekolah, dan guru di Provinsi Riau.

"Kami, para pelaku pendidikan Provinsi Riau, menyatakan sanggup menjadikan sekolah sebagai rumah belajar yang nyaman untuk menyemai budi pekerti pada diri putra dan putri kami," bunyi paragraf pertama.

"Kami, menyatakan siap mengoptimalkan penyelenggaraan program Penguatan Pendidikan Karakter di segenap satuan pendidikan Provinsi Riau, yang dilaksanakan secara bertahap sesuai kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah masing-masing," lanjutnya pada paragraf berikutnya.

"Kami, dengan ini berazham untuk mendidik dan mengatarkan anak-anak kami menjadi insan yang cerdas dan berakarakter terpuji demi menjaga kehormatan negeri," tutup paragraf.

Pada kesempatan ini juga, Gubernur Riau menambahkan,

program Penguatan Pendidikan Karakter sangat bagus, dan harus diberikan dukungan. "Dalam jamuan makan malam di Gubernuran, dan apel pagi di halaman kantor gubernuran, Pak Mendikbud sudah banyak menjelaskan tentang PPK. Menurut saya program ini sangat bagus dan patut kita dukung penyelenggaraannya," kata Gubernur.

Di kesempatan yang sama, Mendikbud menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur beserta para pelaku pendidikan di Provinsi Riau yang telah menyampaikan pernyataan dukungan terhadap pelaksanaan program Penguatan Pendidikan Karakter. Dalam penerapan PPK, kata Mendikbud, tidak sama dengan penerapan *Fullday School*. "PPK ini tidak sama dengan *Fullday School*, dan Kemendikbud tidak menjalankan *Fullday School*," tegas Mendikbud.

"Terdapat lima karakter yang harus dikembangkan dalam penguatan pendidikan karakter ini, yakni religius, nasionalisme, kemandirian, integritas, dan semangat gotong royong, sehingga sumber belajar di luar sekolah bisa diajak aktif dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kita kuatkan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagai penguatan karakter di sekolah," pungkas Mendikbud.

■ (Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan / Laman: www.kemdikbud.go.id)

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DUKUNG PROGRAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) memberikan dukungan terhadap Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dukungan dan apresiasi disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Syafruddin, saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Diskusi Kelompok Terpumpun tim Penguatan Pendidikan Karakter, di kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (07/07/2017).

“Kami sangat mengapresiasi kebijakan Bapak Mendikbud, dan apa langkah-langkah yang dilakukan Mendikbud dalam rangka pembangunan karakter,” tutur Syafruddin.

Syafruddin mengatakan, untuk membangun generasi muda yang lebih baik, langkah tepat adalah penguatan karakter pada anak.

“Dengan adanya penguatan pendidikan karakter diharapkan bangsa Indonesia dapat semakin besar, semakin terbuka, dunia tanpa batas dengan generasi muda mendatang jauh lebih baik, dan jauh lebih berkarakter tentunya,” kata Syafruddin.

“Kami harapan gerakan PPK dapat berjalan dengan baik, karena perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia yang membutuhkan respons strategis dari dunia pendidikan yang menyiapkan generasi penerus bangsa,” pesan Syafruddin.

Pada kesempatan ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh POLRI terhadap penerapan PPK. Selain itu juga, Mendikbud merespons sekolah dan pemerintah daerah (Pemda) yang telah menerapkan

PPK di tahun pelajaran baru. Sekolah dan Pemda tersebut, kata Mendikbud, agar segera dibentuk tim asistensi di tingkat daerah. Tim tersebut dapat turun ke sekolah-sekolah membantu merancang pola koordinasi dan manajemen penyelenggaraan yang baik sesuai dengan kondisi di setiap satuan pendidikan.

“Saya harapan sekolah dan daerah yang sudah menerapkan PPK di tahun pelajaran baru, agar segera membentuk tim asistensi di tingkat daerah, dan turun ke sekolah membantu merancang pola koordinasi dan manajemen penyelenggaraannya. Tolong dibantu yang benar-benar bersedia saja dulu,” pesan Mendikbud.* ■ (Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan / Laman: www.kemdikbud.go.id)



PPDB 2017, IRJEN: BANYAK LAPORAN TERKAIT KENDALA *SERVER*

Dalam rangka menjawab pertanyaan masyarakat mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 danantisipasi pungutan liar, TVRI mengundang Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto, sebagai narasumber di acara dialog langsung Semangat Pagi Senin (10/07) pukul 07.30-08.00 WIB.

Pemerintah menggunakan sistem zonasi yaitu mengatur tentang penerimaan Peserta didik baru agar sesuai dengan wilayah sekolah terdekat yang tertuang di Peraturan Mendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dengan adanya Permendikbud ini diharapkan dapat menghapus citra sekolah favorit, karena sekolah harus menerima 90% siswa yang berada di zona nya.

Sehubungan dengan pengalihan wewenang pengelolaan SMA dari Pemerintah Kota/Kabupaten ke Provinsi, hal ini menjadi pengalaman pertama bagi banyak provinsi yang menggelar PPDB baik itu daring mau pun luring, sehingga masih ditemukan sejumlah kendala.

“Terkait dengan PPDB, Kemendikbud menerima masukan di Unit Pelayanan Terpadu (ULT) dan juga melalui situs Inspektorat

Jenderal Kemendikbud. Terdapat 27 laporan yang ada di Itjen Kemendikbud, sedangkan untuk di ULT ada 213 laporan. Jika ditotal terdapat kurang lebih 240 laporan, paling banyak terkait dengan sistem daring yang terkendala di *server* karena banyak yang mengakses secara konkuren,” Ujar Daryanto selaku Inspektur Jenderal.

Kesiapan di daerah terkait pelaksanaan zonasi memang membutuhkan SDM & infrastruktur

juga terdapat laporan soal pungutan liar. “Terkait dengan pungutan liar, terdapat penyalahgunaan wewenang dan juga calo yang menjanjikan kepada siswa agar mendapatkan sekolah yang diinginkan,” kata Daryanto.

“Sanksi yang diberikan tentang pungutan liar, disesuaikan dengan keberadaan pelaku/oknum pungli, jika berada di kedinasan dilakukan pemecatan/penurunan pangkat, sedangkan untuk pelaku/oknum di



Itjen Kemdikbud

yang memadai. Irjen Daryanto mengatakan dalam Permendikbud no 17 tahun 2017 tentang PPDB, dilengkapi dengan Surat Edaran Mendikbud no 3 tahun 2017, untuk daerah yang sudah siap melakukan zonasi, dapat dilakukan dengan baik, sedangkan untuk yang belum siap dapat dilakukan bertahap karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda.

Dari 240 laporan yang masuk,

luar kedinasan diproses melalui jalur hukum.” tambahnya.

Kendati demikian, pelaksanaan PPDB secara keseluruhan dapat dikatakan berjalan dengan baik. Irjen Daryanto turut mengapresiasi seluruh pihak atas kelancaran PPDB, khususnya Ombudsman dan aparat penegak hukum, untuk mengawal agar PPDB berjalan dengan transparan, akuntabel, objektif, dan tidak diskriminatif. ■ (IYN/MBS)

PPDB, IRJEN: STOP PARADIGMA SEKOLAH EKSKLUSIF, RATAKAN KUALITAS PENDIDIKAN

Ombudsman kembali menerima laporan kecurangan dan pungli dalam penerimaan peserta didik baru. Modusnya tidak lain merupakan jual beli kursi di sekolah unggulan dan hal ini tidak hanya terjadi di kota besar tetapi juga di sejumlah daerah.

Itjen Kemdikbud



Ahmad Suaedy selaku Komisioner Ombudsman sangat menyayangkan mengenai jual beli kursi yang masih terjadi di beberapa sekolah setiap tahunnya. Lebih lanjut adanya sistem zonasi dinilai masih kurang untuk menyelesaikan masalah kesenjangan antara sekolah favorit dengan sekolah biasa. Ia menjelaskan layaknya di Jakarta sistem ini masih kurang

sosialisasi.

“Zonasi ini merupakan usul dari Ombudsman, melihat kesenjangan antara sekolah favorit dengan sekolah biasa atau yang dianggap kurang. Di mana kalau favorit mendapat murid yang baik, fasilitas yang baik dan orang tuanya kaya,

sedangkan yang lain tidak” ungkap Ahmad Suaedy.

Mendikbud Muhadjir Effendy juga mengatakan bahwa kebijakan zonasi bertujuan agar orang tua tidak memaksakan diri menyekolahkan anak-anaknya pada sekolah favorit, meski jarak yang ditempuh cukup jauh.

Dugaan pungli dan sistem zonasi dinilai memiliki masalah

besar dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2017. Minimnya sosialisasi menyulitkan para orang tua dalam mendaftarkan anaknya secara *online*.

“Sistem zonasi memang untuk mengatasi perbedaan status sekolah yang favorit dengan yang terpinggirkan agar sama-sama maju dan saling diminati. Dan tentu dalam hal ini Pemerintah ingin agar kualitas pendidikan Indonesia merata,” ungkap Irjen Daryanto saat ditemui dalam dialog *Prime Talk* di Metro TV, Senin (10/7).

Irjen Daryanto juga menambahkan, sejak awal tahun 2017 sebenarnya sudah disosialisasikan mengenai zonasi kepada dinas pendidikan setempat beserta Ombudsman. Namun kendala yang terjadi adalah kurang efektifnya informasi yang didapat oleh para orangtua karena minimnya penggunaan internet.

“Yang pertama, saya ingin menghargai karena Kemendikbud mau mengadopsi ide kami tahun lalu. Namun ternyata kami baru sadar bahwa 20 tahun desentralisasi ternyata belum menyentuh pendidikan. Fasilitas yang baik hanya bisa

Cuplikan Peristiwa

ditemukan di kantor pusat. Jadi kendala zonasi bukan hanya karena keputusan yang terlalu dekat, melainkan kenyataan yang belum dapat diterapkan. Meskipun ada kemungkinan dan itu pastinya bertahap,” jelas Ahmad Suaedy.

Ia juga mengungkapkan adanya penyimpangan dan toleransi yang keduanya memiliki arti yang berbeda. Pada toleransi terjadi pada fasilitas yang menumpuk di suatu kota sehingga bagaimana cara membentuk zonasi jika terjadi penumpukkan. Sedangkan penyimpangan contohnya ketika *online* lalu *server down* dalam satu hari, yang terjadi

adalah mereka mencatat ulang dan keesokan harinya dapat kembali lagi. Tentu sela-sela pergantian hari bisa menyebabkan indikasi penyimpangan saat PPDB.

Tidak hanya aduan sistem *online* yang ditujukan ke Ombudsman, melainkan MoU antara sekolah dengan Dinas Pendidikan atau kelompok tertentu yang meminta jatah atau kuota. Faktor geografis menurut Inspektur Jenderal Daryanto juga berpengaruh terhadap pembagian zonasi. “Kita menyadari bahwa faktor geografis menjadi hal yang tidak mudah untuk penerapan zonasi. Tetapi yang paling penting kita jangan

mendiskriminasi peserta didik dalam hal ini sekolah melalui dinas pendidikan setempat. Harus adil dan objektif untuk menerapkan kebijakan,” Kata Irjen.

“Kita ingin sekolah-sekolah jangan hanya eksklusif di beberapa bagian, tetapi juga merata pada kualitas pendidikannya. Lalu Pemerintah akan memastikan sekolah yang sudah sistem zonasi tadi harus memiliki fasilitas dan prasarana yang imbang sebagai jaminan agar anak didik berprestasi yang sekolah di tempat tersebut tidak merasa rugi atau akan berkurang ilmunya,” tambahnya. ■ (WNIH/MBS)

CEGAH KEKERASAN DALAM PPDB 2017 DENGAN PERMENDIKBUD NO.18 TAHUN 2016

Kemendikbud mengadakan konferensi pers berkaitan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 di perpustakaan Kemendikbud Jakarta pada Selasa (11/7) siang. Hadir dalam konferensi pers tersebut Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Hamid Muhammad.

“Untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan seperti tindak kekerasan pada masa orientasi dan pengenalan lingkungan sekolah, Kemendikbud menerbitkan

Permendikbud No 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah,” kata Hamid Muhammad.

Terkait tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, Hamid menyampaikan “Tidak dibenarkan kegiatan ekstrakurikuler ada di luar sekolah agar guru juga ikut mengawasi setiap kegiatan ekstrakurikuler.”

Ada pun untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terkait dengan Zonasi, Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto mengatakan bahwa, terdapat masukan atau laporan dengan jumlah

240, ada yang berupa saran dan informasi, untuk PPDB sekitar 48% aduan.

“Sistem *online* yang tersangkut di *server* karena banyak yang mengakses *website* agar segera diatasi, supaya orang tua murid dapat tenang serta jauh dari oknum atau calo tentang pungutan liar,” jelas Irjen Kemendikbud Daryanto.

“Terkait dengan PPDB, yang diutamakan yaitu objektif, transparan, akuntabel, dan tidak ada diskriminasi,” tegasnya. ■ (YAN/RIN)

INDONESIA – SWISS SEPAKATI KERJASAMA PENDIDIKAN VOKASIONAL

Presiden Joko Widodo pada Jumat, 14 Juli 2017, menerima kunjungan kehormatan Menteri Ekonomi, Pendidikan, dan Riset Swiss Johann N. Schneider Ammann di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Kedua pihak mengharapkan kunjungan tersebut dapat mempererat kerja sama antara Indonesia dan Swiss dalam bidang ekonomi, pembangunan, transportasi, dan yang paling utama dalam hal pendidikan.

Dalam bidang ekonomi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang memberikan keterangan usai pertemuan itu mengatakan bahwa Swiss merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam hubungan kerja sama kedua negara. Nilai perdagangan bilateral Swiss dalam tiga tahun belakangan mengalami peningkatan sebesar 283 persen.

“Yang paling nyata adalah perdagangan bilateral antara Indonesia dan Swiss dalam tiga tahun ini mengalami kenaikan hampir 283 persen,” ujarnya.

Presiden sendiri menyambut baik kehadiran *Swiss Business Hub* di Jakarta yang telah diresmikan oleh Johann N. Schneider Ammann. Kepala Negara berharap ke depannya Swiss dapat menjadikan Indonesia sebagai negara basis produksi di Asia Tenggara.

Sementara dalam bidang pendidikan, Pramono mengungkapkan bahwa Swiss turut menawarkan kerja sama di bidang pendidikan vokasional. Presiden Joko

Widodo sendiri tentu menyambut baik tawaran tersebut karena dinilai sejalan dengan program pembangunan Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang turut memberikan keterangannya menambahkan bahwa Swiss merupakan salah satu negara yang paling maju dalam bidang pendidikan di antara sekian banyak negara lainnya.

“Saya juga sudah berbicara untuk menindaklanjuti segera sebelum kunjungan Presiden nanti ke Swiss, mungkin akhir tahun, kita sudah siap dengan kerja sama yang lebih rinci di bidang vokasional,” ujar Darmin.

Bentuk kerja sama tersebut, ungkap Darmin, ialah serupa dengan apa yang sudah terjalin selama ini di Kota Solo dan Bandung. Di sana, sudah terdapat akademi

dan politeknik yang merupakan hasil kerja sama kedua negara dengan kualitas pendidikan yang sangat baik.

“Kita mau mereplikasi itu untuk hampir setiap kota supaya ada pendidikan dan vokasional di seluruh Indonesia. Mungkin tidak banyak, tetapi di setiap kota besar akan kita buat,” ucapnya.

Darmin memastikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan dan kesepakatan kerja sama yang sangat produktif tersebut. Ia juga akan segera berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Tenaga Kerja untuk bersama-sama mempersiapkan segala hal teknis lainnya. ■ Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden / Bey Machmudin



Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

CAPAI NAWACITA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER TERUS DIGALAKKAN

Bersumber dari implementasi nawacita pada bidang pendidikan, Penguatan Pendidikan Karakter terus digalakkan untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi oleh hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi) dan olah raga (kinestetik) sesuai dengan falsafah Pancasila.

Pada program aksi presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam sektor pendidikan ada empat program, yakni percepatan Indonesia Pintar sebagai salah satu sarana untuk memperluas bagi yang kurang mampu, revitalisasi sekolah

kejuruan, implementasi pendidikan dan peninjauan ulang penyelenggaraan Ujian Nasional.

“Untuk percepatan Kartu Indonesia Pintar sudah tersalurkan lebih dari 85% termasuk dananya. Sedangkan revitalisasi SMK sudah turun Keputusan Presiden no 6 tahun 2016, tahun ini kita harapkan ada 200 SMK yang memiliki fasilitas standar sehingga mereka bisa siap bekerja di dunia luar,” ungkap Mendikbud Muhadjir Effendy saat ditemui dalam temu redaktur media di Graha 1 Kemendikbud, Rabu (12/7).

Mendikbud Muhadjir Effendy

juga menambahkan pada Ujian Nasional tahun ini sudah menata mata pelajaran untuk menjadi standarisasi penentu kelulusan. Sehingga di semua kesatuan nantinya sudah berbasis komputer. Pada penentuan hasilnya nanti, siswa akan mendapatkan dua rapor dari pihak sekolah, yaitu rapor dengan prestasi mereka dan rapor dengan aktivitas yang juga di dapat dari ekstrakurikuler.

“Ekstrakurikuler inilah yang menjadi bagian terpenting dalam PPK. Penguatan ini bukan semata-mata ditujukan untuk menjadi beban siswa, akan tetapi mengacu



Itjen Kemdikbud

pada beban jam kerja pengajar.”
Jelas Mendikbud.

Hal ini mengingat guru sudah diwajibkan memenuhi ketentuan beban kerja 40 jam selama lima hari dalam satu minggu sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Namun tidak berarti tatap muka dilakukan oleh guru selama delapan jam di dalam kelas. Guru diberikan kebebasan berkreasi mengembangkan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa.

“Yang jadi masalah adanya jasa pada pelaksanaan

ekstrakurikuler. Solusinya bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak luar sehingga siswa yang biasanya ikut sanggar tari di luar, namun karena sudah ada kerja sama dengan sekolah dapat diakui dan mengembangkan kreativitas siswa.” ucap Mendikbud.

Terkait zonasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2017 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), zonasi bertujuan agar bisa mendapatkan fasilitas dan prasarana belajar yang sama.

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib

menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Kemudian 10 persen dari jumlah peserta didik dibagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen jalur prestasi dan lima persen bagi peserta didik yang mengalami perpindahan domisili.

Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Namun, sistem zonasi ini tidak berlaku bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). ■ (WNH).

STAR BANTU FOKUS PENGGUNAAN ANGGARAN

Itjen Kemdikbud



Kehadiran program *State Accountability Revitalization* (STAR) diharapkan membantu pemerintah lebih fokus dalam hal menyusun dan melaksanakan pembangunan selain berdampak luas terhadap makin membaiknya tata kelola keuangan negara.

Ini dikemukakan Kepala BPPK,

Ardan Adiperdana ketika berbicara ditengah acara penandatanganan MoU pengembangan *Center of Excellence* dengan delapan rektor yang disaksikan Mendagri dan Sekjen Kemenristek Dikti di Jakarta hari Selasa (18/7).

Program STAR yang merupakan kerjasama dengan Bank

Pembangunan Asia (ADB) itu, merupakan program beasiswa bagi 452 lulusan S1 dan 1.503 lulusan S2 yang berasal pegawai dari berbagai provinsi, kabupaten, dan pemerintah kota.

“Bagi kami sangat terbantu sekali dalam perbaikan kinerja tata kelola keuangan hingga beberapa tahun terakhir mampu meraih WTP,” kata gubernur Jabar Hery Setiawan mewakili gubernur yg hadir dalam pertemuan akbar itu.

Sementara Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pemerintah itu adalah satu dari presiden hingga aparat desa dan kelurahan, karena itu dengan program ini sudah lebih fokus dalam membuat anggaran dan penggunaannya. ■ (emte)

RAKER INSPEKTORAT I, ITJEN SIAPKAN TIGA SATKER MENUJU WBK

Inspektorat Jenderal Kemendikbud melalui Inspektorat Wilayah I bidang PAUD, DIKMAS, dan Kebudayaan melaksanakan Raker “Satker Paud dan Dikmas, Satker Kebudayaan, dan Satker Itjen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi melalui Pengendalian Gratifikasi, Peta Risiko, Penguatan SPI dan Tata Kelola” di Hotel Vasa Surabaya, selama 3 hari dari 17 s.d. 19 Juli 2017.

Tujuan Rapat Kerja Inspektorat I Inspektorat Jenderal Kemendikbud secara umum bertujuan untuk mempersiapkan sebanyak 3(tiga) satuan kerja.

Ketiga satuan kerja itu adalah Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini PAUD dan Pendidikan Masyarakat, Ditjen Kebudayaan, serta Inspektorat Jenderal yang merupakan cakupan kerja Inspektorat I Itjen Kemendikbud dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan tercapainya program strategis di Bidang pendidikan dan kebudayaan.

Adapun tujuan secara khusus Rapat Kerja Inspektorat I ini bertujuan untuk mempersiapkan serta menentukan mitigasi dan strategi ketiga satker memenuhi kriteria Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK); Mengingat kembali pentingnya peran Satuan Pengawasan Intern (SPI) untuk ketiga satker tersebut; serta Menginformasikan program-program Inspektorat I dalam Penguatan Tata Kelola Satker.

Acara di buka oleh Inspektur Jenderal yang diwakili oleh Sekretaris Itjen Kemendikbud Hindun Basri Purba sekaligus memberikan materi terkait Implementasi Integritas.

Hindun Basri Purba mengatakan Pentingnya Integritas dalam sendi dunia pendidikan, karena seperti yang dikatakan Mendikbud terdahulu bahwa pendidikan adalah hulu pemberantasan korupsi, sehingga penting untuk kita menjaga marwah Instansi Kemendikbud ini menjadi sebuah kekuatan untuk memberantas segala praktik yang merusak integritas bangsa.

Selanjutnya Hindun memaparkan mengenai target dan capaian kinerja Itjen. “Kita patut bersyukur karena Kemendikbud mendapatkan status WTP selama 4

tahun berturut turut,” ujar Hindun. Target kinerja sendiri kata Hindun adalah tercapainya opini BPK terhadap Laporan Keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dilakukan dengan pendampingan dan reuiu Laporan Keuangan, target tercapainya skor LAKIP menjadi baik adalah 80 % dilakukan dengan pendampingan dan reuiu sedangkan target kinerja satker Kemendikbud Wilayah Bebas dari Korupsi dilakukan dengan Internalisasi Pengendalian Gratifikasi.

Adapun acara dihadiri oleh Rapat Kerja Inspektorat I yang melibatkan peserta sebanyak 247 orang, yang terdiri dari 129 orang peserta pusat, 85 orang peserta daerah, narasumber 10 orang, dan panitia 23 orang. ■ (NHP/MBS)

Itjen Kemendikbud



HARI PERTAMA SEKOLAH, MENDIKBUD PIMPIN APEL ANAK CERDAS BERKARAKTER

Istimewa



Berepatan dengan Hari Pertama Sekolah tahun ajaran 2017/2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memimpin apel “Anak Cerdas Berkarakter” di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng). Dalam sambutannya, Muhadjir mengingatkan kembali pentingnya sinergi tri pusat pendidikan dalam gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

“Orang tua atau keluarga adalah pendidik pertama dan utama, hendaknya sekolah, rumah dan masyarakat bersinergi menciptakan ekosistem pendidikan yang dapat mendukung gerakan pendidikan karakter,” disampaikan Mendikbud di depan para guru, siswa dan pemangku kepentingan pendidikan kota Palangka Raya.

Hari pertama sekolah, menurut Mendikbud, merupakan

momentum baik bagi orang tua (keluarga) untuk dapat menjalin hubungan baik dengan para pendidik di sekolah. Dengan manajemen berbasis sekolah, diharapkan sekolah berperan sebagai sentral dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber belajar di sekitarnya.

Peran serta masyarakat dalam upaya memajukan pendidikan semakin terbuka luas. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016, masyarakat dapat berkolaborasi dengan Komite sekolah dapat mendorong perbaikan di tingkat satuan pendidikan.

Mendikbud berpesan kepada para siswa agar tidak hanya mengejar unsur akademis saja, namun juga dapat menggali dan mengoptimalkan minat dan bakat. Sesuai dengan prinsip gerakan PPK, siswa tidak hanya didorong untuk

mengolah pikir saja, namun juga mengolah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), serta olah raga (kinestetik).

“Kamu yang tidak pandai mata pelajaran tertentu, jangan berkecil hati. Saya yakin kamu memiliki keunggulan di mata pelajaran lain atau pada hal-hal lainnya. Asah terus, saya percaya itu dapat bermanfaat untuk masa depanmu,” pesan Mendikbud. Kepada para guru, Mendikbud berpesan agar dapat mendampingi siswanya. Menurutnya, keberhasilan penerapan pendidikan karakter terletak pada para guru.

Dalam kesempatan Apel “Anak Cerdas Berkarakter” pagi ini diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya tiga stanza. Mendikbud juga memperkenalkan Tim Implementasi gerakan PPK Provinsi Kalteng, di antaranya Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kalteng Krisnayadi Tundan, Elis Setiati Balai Bahasa Kalteng, Mulyati Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri (SDN) Percobaan Palangka Raya.

Turut hadir mendampingi Mendikbud, Walikota Palangka Raya Riban Satia, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid, Direktur Sejarah Triana Wulandari, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Nadjamuddin Ramly. ■ (Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan / Laman: www.kemdikbud.go.id)

LIBATKAN 16 KEMENTERIAN/LEMBAGA, ITJEN KEMENDIKBUD GELAR BIMTEK TELAAH SEJAWAT

Itjen Kemdikbud



Mempelajari kertas kerja program telaah sejawat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIFI) tahun 2017, Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan Bimbingan Teknis Telaah Sejawat di Gedung B Itjen Kemendikbud Jakarta pada Kamis (27/7/2017).

Acara dihadiri oleh tim telaah sejawat 16 lembaga/kementerian yang terdiri dari 1. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, 3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, 4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, 5. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, 6. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, 7. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, 8. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 9. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, 10. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan, 11.

Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 12. Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 13. Inspektur Utama Bappenas, 14. Inspektur Utama BKKBN, 15. Inspektur BMKG, 16. Inspektur Prov. DKI Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Inspektur Jenderal Daryanto membuka *Workshop* Bimtek Kertas Kerja Telaah Sejawat Tahun 2017 didampingi oleh Sekretaris Inspektur Jenderal Kemendikbud Hindun B. Purba. Hadir pula Raida Sitorus selaku Auditor Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan dan Robeth Gonijaya yang merupakan Inspektur 7 Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan.

“Dengan adanya *workshop* ini, tentu akan membantu kita dalam mempelajari kertas kerja telaah sejawat tahun 2017. Nanti Bapak, Ibu pada saat pelaksanaannya, diharapkan melakukan penilaian secara objektif. Kita tahu kita semua sudah bekerja keras,” ucap Irjen Daryanto.

Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto memastikan kepada tamu undangan untuk benar-benar bekerja dengan baik demi memberikan manfaat bagi Instansi dan pimpinan. Irjen juga menambahkan kepada tim telaah sejawat untuk tidak mengkhawatirkan pembiayaan, hal ini bertujuan agar tidak mengganggu kinerja pada saat menelaah. “Diharapkan Bapak Ibu selaku pemangku kepentingan ini bekerja dengan baik karena mengingat di dalamnya terdapat kuisisioner yang nantinya akan dinilai secara objektif,” tambahnya.

Perbedaan nilai yang hanya selisih sedikit tak jarang menuai perdebatan. Hal ini juga yang menjadi pesan Irjen Kemendikbud agar lebih mengoptimalkan pencapaian level kinerjanya.

Sekretaris Itjen Kemendikbud, Hindun B. Purba mengatakan bahwa dengan adanya telaah sejawat ini sangat membantu pencapaian level 3 di Inspektur Jenderal Kemendikbud sehingga ia mengajak para tim telaah sejawat dari kementerian lain untuk tetap optimis dan tidak berkecil hati bagi yang masih mendapatkan nilai kecil. “Untuk itu Bapak Ibu jangan berkecil hati, Itjen Kemendikbud sudah membuktikan betul adanya telaah sejawat ini sangat berguna,” ungkapny.

Pentingnya pendokumentasian kinerja juga disampaikan oleh Sekretaris Itjen Kemendikbud untuk membantu kenaikan nilai presentase tersebut. ■ (WNIH/RIN)

CEGAH PERUNDUNGAN BUTUH KERJASAMA BANYAK PIHAK

Inspektur Jenderal Daryanto menjadi narasumber pada acara salah satu stasiun Televisi Swasta dengan tajuk perundungan (*bullying*), Jumat malam (28/7). Hadir sebagai narasumber dalam acara ini Desy Ratnasari (Komisi 8 DPR RI), Retno Listyarti (Sekjen FSGI), serta Reza Indragiri Amril selaku Kabid Pemenuhan Hak Anak Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI).

“Sejumlah Peraturan Menteri dikeluarkan untuk melatih budi pekerti, lalu mencegah lingkungan sekolah dari asap rokok juga dari kekerasan,” tegas Daryanto.

Irjen juga mengatakan bahwa pelaku dan korban perundungan atau *bullying* telah dipayungi oleh aturan dan undang-undang sebagai hak dari setiap anak. Jika hal tersebut dilihat dari kacamata psikologis anak yang menjadi

Pendapat Reza Indragiri mengenai sanksi pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan mengeluarkan siswa dianggap berkebalikan dengan filosofi penghukuman terhadap anak. Anak-anak yang bertindak anarkis memang harus diberi sanksi agar ada efek jera dan pembelajaran. Namun, sanksi jangan sampai menghilangkan hak mereka sebagai anak. Pendapat tersebut juga diamini oleh

Itjen Kemdikbud



Tindakan perundungan (*bullying*) hadir dalam berbagai bentuk di sekolah. Guna menanganinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah mengeluarkan Permendikbud khusus tentang hal tersebut, salah satunya adalah Permendikbud 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

korban mau pun pelaku bahwa mereka masih memiliki perjalanan waktu yang panjang yang harus di jaga bersama. “Kita tidak hanya melihat saja, kita harus melakukan pembinaan yang baik yang dimulai dari rumah dan jangan lupa bahwa media massa dan sosial tentu juga memberikan peran penting dalam segi kembang anak menjadi positif,” kata Irjen.

Daryanto. “Saya sepakat bahwa hak anak untuk sekolah harus tetap dilindungi,” ungkap Irjen.

Lebih lanjut Inspektur Jenderal juga mengatakan bahwa pencegahan perundungan membutuhkan kerja sama banyak pihak. “Keluarga, masyarakat, media penting dalam membentuk karakter anak agar tercegah dari perundungan,” tambahnya. ■ (NHP/MBS)

MENTERI DAN PEJABAT KEMDIKBUD HADIRI PENYAMPAIAN TEMUAN DALAM PPDB DI OMBUDSMAN RI

Ombudsman RI menggelar konferensi pers untuk menyampaikan temuan maladministrasi dalam pemantauan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun ajaran 2017/2017 pada Senin (31/7/2017).

Konferensi pers dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto, Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi, dan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad, serta Wakil Ketua Ombudsman RI Lely Pelitasari Sorbekti dan Anggota Ombudsman Ahmad Su'adi serta beberapa pegawai Kemdikbud dan Ombudsman RI di gedung Ombudsman RI.

Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, OMBUDSMAN RI, melakukan pemantauan pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2017/2018, terutama di jenjang SMP, SMA, dan sekolah sejenis yang sederajat secara nasional.

Pemantauan dilakukan dalam rangka menjalankan tugas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang OMBUDSMAN RI & Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Adapun hasil temuan OMBUDSMAN RI selama pemantauan PPDB di antaranya yaitu

- Di beberapa daerah terdapat sistem *online* PPDB tidak beroperasi dengan baik sehingga sekolah merasa terganggu;
- Beberapa sekolah ditemukan memungut biaya administrasi pendaftaran dan uang bangunan; dan
- Belum berfungsinya pelayanan/pengaduan masyarakat di internal dinas pendidikan atau sekolah-sekolah dalam pelaksanaan PPDB sehingga masyarakat merasa tidak ada kepastian pelayanan.

ikut serta menyelesaikan masalah tersebut, sedangkan terkait permasalahan *server yang down*, sedang kami selesaikan dengan baik, terutama daerah Jawa Barat dan beberapa daerah yang bermasalah,” ujar Mendikbud.

Irjen Daryanto menambahkan, “Untuk daerah Jawa Barat memang kekurangan ruang kelas. Oleh karena itu, kami sudah membangun beberapa ruang kelas dan alhamdulillah sudah teratasi.”

Adapun usulan perbaikan dari Ombudsman RI yaitu



“Banyaknya surat miskin palsu serta terdapat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim saber pungli OMBUDSMAN RI yang bekerja sama dengan POLRI di beberapa daerah, untuk itu agar segera diatasi,” ujar Ahmad Su'adi.

“Tentang penyalahgunaan wewenang terkait OTT, sudah kami tindak lanjuti. Untuk hal ini, komite sekolah juga berpengaruh untuk

merencanakan dan menerbitkan aturan PPDB lebih awal untuk memberikan rentang waktu yang cukup kepada Pemda dan Sekolah menyesuaikan aturan baru serta menindak tegas penyelenggara dan atau operator/*provider* PPDB *online* yang mengalami gangguan *server* saat penyelenggaraan PPDB. ■ (YAN)



MERIAHNYA MERDEKA

Perayaan hari kemerdekaan RI ke-72 tahun ini nampak sangat berbeda dibanding sebelumnya, setidaknya di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang terkesan campur aduk antara syahdu, khidmat, heboh, meriah dan penuh keguyuban tanpa sekat antara pejabat hingga petugas *office boy* dan masyarakat sekitar.

Semua terlibat dan semua bergembira ketika Inspektur Jenderal Kemendikbud Daryanto memberi komando untuk dimulainya berbagai lomba yang melibatkan karyawan dan masyarakat luar.



Cuplikan Peristiwa



Lomba Penyiara Berita

Sorak surai tiba-tiba meledak ketika peserta lomba karung jatuh bangun untuk mencapai *finish* atau diarena lomba tepukan *supporter* memberi semangat kepada peserta makan kerupuk yang terlihat heboh lantaran membludaknya peserta lomba untuk mengadu kemahiran masing-masing.

Diarena lain, sebuah panggung khusus didirikan untuk menghibur

Lomba Makan Kerupuk

- 1 Dade
Bagian Umum
- 2 Rudi
Bagian Umum
- 3 Parimin
Bagian Umum

Lomba Balap Karung

- 1 Kholil
Bagian Umum
- 2 Triono
Bagian Umum
- 3 Tito
Bagian Umum

Lomba Estafet Sarung

- 1 Tim Heri
Bagian Umum
- 2 Tim Tri (Satpam)
Bagian Umum
- 3 Tim Sunandar
Bagian Umum

Lomba Dart

- 1 Ridwan Makassar
Bagian Umum
- 2 Rifandi
Bagian Umum
- 3 Triono
Bagian Umum

Lomba Lambat Motor

- 1 Hari Zakaria
Bagian Umum
- 2 Rudi
Bagian Umum
- 3 dr. Resti
Bagian Umum

Lomba Gigit Koin

- 1 Aming
Bagian Umum
- 2 Andi Meilani
Bagian Umum
- 3 Rudi Supomo
Bagian Umum

Lomba Baca Berita

- 1 Shelly
Insp. Investigasi
- 2 Suparmi
Bagian Umum
- 3 Fajarini
Puslitjak Balitbang

Lomba Menyanyi

- 1 Fajarini
Puslitjak Balitbang
- 2 Suwargo
Ditjen GTK
- 3 Pung
Ditjen GTK

pengunjung dengan mempertunjukkan kebolehan bentuk kolaborasi antara pemain *home band* Itjen dengan kelompok pengamen yang sejak beberapa waktu lalu menjadi anak asuh Itjen Kemendikbud. Selain menjadi arena panggung hiburan juga disiapkan lomba *pop singer* untuk babak final yang diikuti berbagai peserta di bagian di lingkungan Kemendikbud.

Hentakan drum yang memekikkan telinga kemudian berbaur dengan alunan suara merdu deretan penyanyi “dadakan,” terkadang menundang tawa dari pengunjung yang secara khusus diberi kepercayaan oleh panitia untuk menjadi juri.

Lomba yang terkesan sedikit serius terjadi di arena ruang siar Radio Itjen Kemendikbud, untuk memperebutkan kejuaraan lomba baca naskah berita secara *live*. Hasil dari kejuaraan tersebut rencananya akan memperoleh kesempatan untuk dilatih menjadi penyiar profesional oleh penyiar ternama tanah air.

Peminat lomba foto jurnalistik juga tak kalah membludaknya yang diikuti masyarakat umum, beberapa diantara nominator ternyata memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi fotografer profesional. ■ (Emte)



Lomba Menyanyi



Lomba Balap Sarung



Lomba Dart



STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WTP

Oleh Robertus Riyanto, S.E., M.M.

Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mulai tahun 2014, 2015, dan 2016 mendapat opini dari BPK-RI. Keandalan informasi laporan keuangan yang disajikan oleh Kemdikbud disusun mulai dari satuan kerja Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), melalui Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) sampai pada kompilasi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPAE1) tersusun menjadi Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) yang merupakan laporan keuangan Kemendikbud.

Dalam rangka mewujudkan opini wajar tanpa pengecualian Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan **Instruksi Mendiknas Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Selaku pembantu Menteri di bidang pengawasan internal, Inspektorat Jenderal harus berperan aktif mengawal Instruksi Mendiknas tersebut.

Peran Inspektorat Jendral sebagai penguatan rencana aksi adalah, (a) Pengawasan dan pemeriksaan baik yang reguler mau pun khusus atas laporan keuangan dilakukan pada periode berjalan; (b) Pendampingan penyusunan laporan keuangan sampel pada tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPAE1, dan UAPA (pusat dan

daerah) dalam implementasinya satker yang membutuhkan pendampingan dapat meminta bantuan Inspektorat Jenderal; (c) Melakukan *review* laporan keuangan pada tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPAE1, dan UAPA (pusat dan daerah).

Selama ini penugasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemdikbud antara *review* LK dan Audit Asurans berjalan sesuai dengan Surat Tugas masing – masing. *Review* LK dilakukan dua kali yaitu Semester Satu dan Semester Dua (Laporan Keuangan Akhir Tahun), sedangkan Audit Asurans dilakukan sekali dalam setahun di setiap satuan kerja dan masing – masing menghasilkan laporan sendiri.

Pada tahun 2017, wilayah kerja Inspektorat I mendapat

tambahan 37 satuan kerja yang berasal dari Direktorat Jenderal PAUD DIKMAS sebanyak 21 satuan kerja dan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebanyak 16 satuan kerja. Semuanya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru yang belum pernah mendapat pendampingan dalam penyusunan LK mau pun dilakukan Audit Asurans.

Review laporan keuangan adalah kegiatan yang memberikan keyakinan terbatas atas angka – angka yang tersaji dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Adapun Audit Asurans akan melakukan audit terhadap seluruh kegiatan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap bukti – bukti yang mendukung kegiatan tersebut sampai pada

pemanfaatan hasil pengadaan.

Apabila antara *review* LK dengan Audit Asurans tertuang dalam satu penugasan akan menghasilkan audit yang lebih tajam. Hal ini dimungkinkan karena hasil *review* bisa memberikan petunjuk terhadap potensi penyimpangan yang akan dialami dalam Audit Asurans.

Dalam penugasan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia khususnya di akhir tahun anggaran yang realisasinya dilakukan pada bulan Februari tahun berikutnya tertulis: **untuk melakukan pemeriksaan atas laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran XX di Jakarta.** Hasil pemeriksaan tersebut di atas terdiri dari: audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit atas sistem pengendalian intern. Audit laporan keuangan menghasilkan opini terhadap laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Audit kepatuhan menghasilkan temuan – temuan yang tidak sesuai dengan kriteria. Audit atas sistem pengendalian intern menghasilkan temuan – temuan terkait dengan penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi sampai pada kegiatan pengendalian. Potensi untuk tidak mendapat opini wajar tanpa pengecualian adalah temuan – temuan dalam audit kepatuhan yang mana nilainya cukup material sehingga berdampak pada pemberian

opini tersebut.

Dengan kondisi tersebut perlu kiranya jajaran Kemendikbud mengambil langkah – langkah konkret untuk memenuhi target laporan keuangan dengan mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Di antaranya dengan cara mengintensifkan pengawasan dan *review* pelaksanaan anggaran untuk merumuskan solusi atas permasalahan yang sedang atau kemungkinan besar akan dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2017, memantau penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan melaksanakan rekomendasi BPK serta memantau permasalahan – permasalahan yang potensial menjadi temuan BPK.

Untuk itu semua perlu keseriusan dari semua satker baik pusat mau pun daerah dalam membuat laporan keuangan mau pun mematuhi semua kriteria dalam pertanggungjawaban keuangan. Hal ini untuk mengantisipasi penugasan BPK di akhir tahun anggaran yang akan mengaudit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan Sistem Pengendalian intern.

Secara umum pengungkapan laporan keuangan dan sistem pengendalian intern sudah lebih baik dari tahun ke tahun, tetapi tidak berarti tanpa masalah. Namun, audit kepatuhan masih menemukan masalah – masalah yang nilainya cukup material antara lain:

a. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum disetor ke

kas negara digunakan langsung di luar mekanisme APBN.

- b. Penyimpangan realisasi perjalanan dinas.
- c. Aset tanah pada Satker di lingkungan Kemdikbud dikuasai oleh dan atau dalam sengketa dengan pihak lain.
- d. Aset tanah pada sejumlah Satker belum didukung bukti kepemilikan sertifikat dan atau bukti sertifikat masih atas nama pihak lain.
- e. Barang Milik Negara (BMN) belum dimanfaatkan.
- f. Pekerjaan pengadaan lisensi dan honor penulisan buku belum dikenakan pajak penghasilan.

Adapun jenis temuan untuk SPI antara lain aset lain – lain:

- a. Tidak didukung rincian dan BAST.
- b. Pencatatan dan pelaporan persediaan belum sepenuhnya didukung penatausahaan yang memadai.
- c. Instansi, lembaga penerima bansos / bantuan pemerintah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- d. Bansos / bantuan pemerintah tidak memperhatikan *cut off* tahun anggaran.
- e. Belanja Bansos / bantuan pemerintah dianggarkan belanja barang.
- f. Belanja modal tidak menghasilkan aset

Di samping itu masih ada kewajiban penyelesaian tunggakan temuan / tindak lanjut dari temuan tahun – tahun sebelum-

nya yang belum terselesaikan.

Semua ini berdampak pada pemberian opini terhadap laporan keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas dasar pendekatan tersebut di atas, kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud khususnya Inspektorat I adalah sebagai berikut :

a. Mempersiapkan personalia yang mampu melakukan pendampingan pembuatan laporan keuangan dengan cara langsung terlibat dalam penugasan yang dipimpin oleh ketua tim yang mempunyai kompetensi

bidang audit keuangan dan akuntansi. Sebelum penugasan dilakukan terlebih dahulu memberi pembekalan kepada para auditor melalui pelatihan di kantor sendiri tentang sistem akuntansi keuangan negara secara intensif. Setiap tim dalam satu penugasan terdiri dari 1 orang ketua, 2 orang anggota di mana ketua tim harus berlatar belakang akuntansi sedang 2 anggota belajar melalui penugasan (*on the job training*)

b. Mempersiapkan Audit Asuransi dengan memanfaatkan hasil *review* laporan keuangan.

Review laporan keuangan terbatas pada pengungkapan dari angka – angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan sehingga perlu didalami sebagai bahan audit operasional.

c. Memberi kesempatan kepada satuan kerja untuk melakukan konsultasi pengadaan barang dan jasa mau pun asistensi tindak lanjut temuan BPK-RI tahun 2016 dan tunggakan temuan tahun – tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan kegiatan satker – satker di antaranya melakukan pengadaan barang



dan jasa pembuatan pedoman bantuan sosial, penghapusan barang milik negara proses tuntutan perbendaharaan / tuntutan ganti rugi serta menindaklanjuti temuan – temuan BPK-RI tahun 2016 mau pun temuan – temuan yang belum terselesaikan auditor Inspektorat I dipersiapkan untuk memberikan pendampingan mau pun asistensi sesuai dengan permintaan dan kebutuhan satker baik di tingkat daerah mau pun pusat.

- d. Mensinergikan antara tugas pendampingan / *review* LK dengan Audit Asurans dalam kurun waktu yang sama atau bersambung. *Review* Laporan Keuangan dilakukan 2 kali yaitu semester I dan semester II kisaran waktu untuk penugasannya Juli dan Desember. Demikian halnya dengan Audit Asurans dilakukan sekali dalam 1 tahun untuk setiap satker kecuali satker pusat. Untuk menghasilkan laporan yang berkualitas perlu kedalaman dalam melakukan audit. Khusus untuk sinergi antara *review* LK dengan Audit Asurans terbagi dalam 2 frekuensi semester 1 dengan sasaran 15 provinsi semester 2 dengan sasaran 18 provinsi dengan pertimbangan frekuensi kedua dilakukan pada semester 2 yang sudah memiliki daya serap keuangan mau pun fisik

- lebih tinggi dari semester 1.
- e. Memberi kepastian jadwal penyusunan laporan keuangan mulai dari tingkat satker daerah, wilayah, eselon I, sampai terhimpun / kompilasi laporan keuangan kementerian. Jadwal penyusunan laporan keuangan sudah dipastikan mulai dari tingkat satker daerah semester I harus sudah diterima oleh eselon I pada tanggal 17 Juli. Laporan keuangan eselon I yang disusun dari satker daerah harus diserahkan kepada Sekjen pada tanggal 24 Juli (1 minggu). Laporan keuangan kementerian harus sudah bisa disampaikan ke bendahara umum negara (Menteri Keuangan) paling lambat tanggal 26 Juli yang mana harus sudah *direview*

oleh Inspektur Jenderal. Begitu juga untuk Laporan Keuangan Kementerian akhir tahun dilakukan berjenjang dari satker daerah sampai ke sekjen sebagai pembuat laporan keuangan kementerian.

- f. Rapat Kerja Inspektorat. Rapat Kerja Inspektorat I tahun 2017 diselenggarakan di Surabaya selama 3 hari mulai tanggal 17 Juli s.d. 19 Juli 2017. Peserta rapat terdiri dari seluruh satker di lingkungan kerja Inspektorat I sebanyak 111 satker. Dalam rapat kerja tersebut di antaranya mengagendakan kegiatan pendampingan penyusunan manajemen risiko serta pemetaan hambatan / kendala penyusunan LK oleh internal auditor. ■

BIODATA PENULIS

NAMA	: ROBERTUS RIYANTO
TEMPAT TANGGAL LAHIR	: YOGYAKARTA, 30 JUNI 1962
PEKERJAAN	: AUDITOR INSPEKTORAT I
JABATAN	: AUDITOR UTAMA
ALAMAT KANTOR	: INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD, JL. JENDERAL SUDIRMAN SENAYAN, JAKARTA
TELEPON	: 021 – 5737104
ALAMAT RUMAH	: JL. ARIMBI 1 No. 6 INDRAPRASTA BOGOR
PENDIDIKAN	: S1 JURUSAN EKONOMI MANAJEMEN UNIVERSITAS SEBELAS MARET S2 MAGISTER MANAJEMEN, UNIVERSITAS MOESTOPO (BERAGAMA)

INSPEKTORAT III ITJEN KEMDIKBUD SIAPKAN KEGIATAN AUDITOR SEBAGAI KONSULTAN

Oleh: Tety Yuliati

Tugas aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP tidak hanya melakukan pengawasan terhadap satuan kerja yang diawasi. Dua tahun terakhir, tugas auditor sebagai konsultan terus digalakkan di Inspektorat III Itjen Kemdikbud. Bila tahun lalu kegiatannya hanya satu yakni fasilitasi/konsultasi maka pada tahun 2017 kegiatan auditor sebagai konsultan ditambah lagi seperti kegiatan pendampingan tata kelola. Pada tahun 2017 ini Inspektorat III menargetkan sebanyak 25 satuan kerja yang akan didampingi oleh auditor untuk mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan tahun 2017 lebih efisien, efektif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Targetnya adalah satuan kerja yang telah mendapat pendampingan dari Inspektorat III siap menjadi satuan kerja yang menerapkan wilayah bebas dari korupsi (WBK). Rencananya kegiatan pendampingan tata kelola akan berlangsung selama 10 (sepuluh) hari.

Perubahan *mind set* Inspektorat III yang semula melakukan tugas-tugas pengawasan rutin yang bersifat *post audit* menjadi tugas memberikan konsultasi disebabkan cara-cara yang sudah dilakukan selama ini misalnya menilai penerapan pengendalian internal, memastikan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku, menilai penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran, serta menilai kualitas pekerjaan satuan kerja dan lain-lain belum berhasil meningkatkan kinerja satuan kerja, serta menjadikan satuan kerja terbebas dari *fraud* ketika dilakukan audit oleh aparat pengawasan eksternal (BPK).

Hasil evaluasi Inspektorat menunjukkan bahwa pengawasan represif atau pengawasan sesudah kegiatan berlangsung yang lebih banyak dilakukan oleh para auditor seperti audit dana sertifikasi guru, audit bantuan pemerintah bidang kebudayaan, audit dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak berhasil memberikan

jalan ke luar atau solusi terhadap persoalan tidak tepat sasaran dan *fraud* yang masih saja dilakukan oleh penerima bantuan tersebut. Oleh sebab itu, Inspektorat III melakukan perubahan strategi dengan melakukan pendampingan pada satuan kerja yang dalam kegiatan tahun 2017 diberi judul pendampingan tata kelola.

Peran konsultasi yang dilakukan oleh auditor Inspektorat III dengan demikian dapat dikategorikan sedang menjalankan fungsi *forsight* yakni auditor Inspektorat III mempunyai pandangan ke depan, memberikan prediksi sekaligus langkah antisipasi bagi kemajuan satuan kerja yang didampingi tata kelolanya. Auditor Inspektorat III tetap tidak melupakan fungsi ke dalam satuan kerja (*insight*) yakni mengawasi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis satuan kerja.

Intinya adalah, supaya aktivitas audit oleh Inspektorat III dapat dikatakan berkualitas, maka para auditor yang ada harus dapat menempatkan posisinya bukan hanya sekedar sebagai peme-

riksa atau pengawas saja, tetapi lebih mengarah kepada seorang konsultan. Aktivitas Inspektorat III sebagai konsultan sebetulnya sejak lama sudah menjadi bagian dari aktivitas pemeriksaan internal karena sudah menjadi tuntutan sekaligus pekerjaan audit yang sesungguhnya di era globalisasi, akan tetapi pada tahun 2017 ini oleh Inspektur Inspektorat III Muhaswad Dwiyanto perannya lebih ditekankan lagi.

Diskusi di Satuan Kerja

Kegiatan pendampingan tata kelola akan diisi dengan diskusi kelompok terpumpun, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh auditor Inspektorat III dengan pimpinan dan para pengelola atau penanggung jawab kegiatan untuk membahas dan mencari solusi secara bersama tentang tata cara pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan barang milik negara secara tepat, benar dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mencari solusi yang tepat terhadap persoalan yang ditemukan oleh auditor Inspektorat III supaya di kemudian hari atau pada saat dilakukan audit oleh eksternal satuan kerja khususnya oleh BPK-RI tidak menjadi temuan.

Kelompok diskusi terpumpun tersebut tidak hanya sekedar

pertemuan formal semata, sebab pada tahapan akhir dari kegiatan tersebut yang direncanakan akan berlangsung selama 3 (tiga) frekuensi, temuan dari auditor tentang kesalahan administrasi, kelemahan struktur organisasi, ketidakcermatan atau ketidaktelitian dalam menuangkan laporan, serta kesalahan prosedur dan hasil-hasil diskusi sebelumnya akan didiskusikan lagi dengan para auditor pengendali mutu dan auditor utama yang memiliki keahlian pada bidangnya.

Dalam acara diskusi terpumpun tersebut, auditor Inspektorat III ingin mengajak pimpinan dan pegawai pada satuan kerja ikut terlibat secara aktif dalam menemukan masalah dan mencari solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan yang dihadapi. Auditor Inspektorat III juga diharapkan dapat memberikan contoh tentang praktek terbaik dalam melakukan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan aset atau barang.

Memberi Nilai Tambah

Suatu auditor internal dapat dikatakan berkualitas jika di antaranya bagian dari audit internal mampu melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan manajemen sebagai *trouble shooting*. Sering kali pihak satuan kerja

Inspektorat III memiliki persoalan yang demikian rumit dan berisiko sehingga meminta bantuan dari Inspektorat III untuk bersama-sama mencarikan jalan ke luarnya. Dalam kaitan ini Inspektorat III akan dinilai sampai seberapa jauh mampu membantu satuan kerja dalam mengatasi persoalan yang ada. Dengan demikian kualitas audit internal oleh Inspektorat III Itjen dalam hal ini dinilai dari seberapa jauh tugas-tugas khusus yang dilakukan mampu bertidak sebagai *trouble shooting*.

Harapan melalui kegiatan pendampingan tata kelola bagi satuan kerja bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, Kebahasaan, dan Sekretariat Jenderal adalah Inspektorat III ingin para auditornya memberikan nilai tambah dalam setiap penugasannya dengan cara memberikan metode-metode, pengetahuan, serta praktik terbaiknya dalam membantu satuan kerja memecahkan persoalan yang dihadapi. Teori mengatakan aktivitas audit internal yang dijalankan secara efektif akan menjadi sesuatu yang sangat berharga di mata satuan kerja. Objektivitas, keahlian, dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang auditor yang kompeten akan dapat secara signifikan memberi nilai tambah bagi pengendalian internal satuan kerja. ■

----- 0000 -----

ARAH PERKEMBANGAN AUDIT INTERNAL:

PERUBAHAN PENDEKATAN AUDIT DARI KONVENSIONAL KE AUDIT KINERJA DI ITJEN KEMENDIKBUD

Oleh: Sogol Sugiarto

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melakukan pengawasan secara reguler sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Jenis pemeriksaan yang selama ini dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah: (a) pemeriksaan operasional, (b) pemeriksaan komprehensif, (c) pemeriksaan kinerja, (d) pemeriksaan bertema terhadap suatu program strategis, (e) pemeriksaan khusus, (f) audit dengan tujuan tertentu, (g) pendampingan penyusunan laporan keuangan, (h) Reviu Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Eselon I dan Kementerian, (i) Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Eselon I, (j) reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), (k) reviu Laporan Keuangan, serta (l) penugasan lainnya dari menteri.

Terkait dengan pemeriksaan kinerja, Inspektorat Jenderal pernah

melakukannya pada periode 2006-2007, pemeriksaan kinerja tersebut baru terhadap sasaran perguruan tinggi saja. Aspek yang di audit adalah: aspek akademik/pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat serta aspek penunjang yaitu: keuangan, kepegawaian, sarana prasarana, dan tata laksana kerja. Pemeriksaan kinerja di perguruan tinggi tersebut menghasilkan skor peringkat nilai, belum mengarah ke audit terhadap capaian sasaran kinerja tiap program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (RENS-TRA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pun turunannya secara berjenjang.

Sedangkan sasaran audit selain perguruan tinggi menggunakan pola pemeriksaan komprehensif atau pemeriksaan operasional saja. Dengan demikian praktis sejak 2007 sampe sekarang Inspektorat Jenderal tidak lagi melakukan audit dengan pendekatan audit kinerja, namun lebih berfokus pada aspek keuangan saja. Salah satu alasan utama belum dilaksanakannya pola audit kinerja tersebut karena adanya kebijakan

pimpinan untuk melakukan audit keuangan, dalam upaya peningkatan tata kelola pengelolaan keuangan agar mencapai opini dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seperti diketahui bersama, sejak BPK-RI mulai memberikan opini terhadap Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan pemerintahan daerah pada tahun 2010, opini Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2010 dan 2011 memperoleh predikat "Tidak Memberikan Pendapat" (TMP), kemudian pada tahun 2012 opini meningkat menjadi "Wajar Dengan Pengecualian"/WDP, dan pada Laporan Keuangan 3 tahun terakhir yaitu 2013, 2014 dan 2015 secara berturut-turut opini meningkat menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian"/WTP, pada laporan keuangan tahun 2016 target opini dipertahankan agar tetap WTP dengan tetap melakukan peningkatan kualitas penyalajiannya.

Pengembangan pola audit kinerja ini sejalan dengan upaya Inspektorat Jenderal saat ini yang sedang meningkatkan level

kapabilitasnya dari level 2 *Infra-structure* (APIP menerapkan praktik dan prosedur yang berkelanjutan dan berulang) menuju ke level 3 *Integrated* (manajemen APIP dan praktik profesional secara merata diterapkan) di mana salah satu persyaratannya adalah melakukan praktek-praktek audit kinerja. Apabila APIP Level 3 ini tercapai maka APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Dengan perubahan dan pengayaan pola audit dari audit yang tidak saja dilakukan secara konvensional (audit operasional atau dengan istilah lain audit komprehensif) ke audit kinerja, diharapkan ke depan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal akan lebih bermanfaat dan dapat memberikan nilai tambah bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kinerjanya secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

RUJUKAN TEORI

Banyak definisi audit yang dikemukakan dari berbagai literatur, di sini penulis hanya menyampaikan dari satu sumber yaitu menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia/AAIPI, 2013):

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai

kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Demikian pengertian kinerja, menurut Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Audit Kinerja Pemerintah Daerah, Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik (2007)

Kinerja adalah pencapaian keluaran (*output*) atau dampak (*outcome*) yang diperoleh oleh orang atau sekumpulan orang dalam organisasi yang melakukan kegiatan atau operasi demi pencapaian misi dan tujuan organisasi melalui pelaksanaan suatu urutan kegiatan yang terencana.

Dari dua pengertian audit dan kinerja di atas, kemudian digabung menjadi satu pengertian yaitu audit kinerja. Penulis hanya mengutip definisi dari satu sumber saja yaitu menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia/AAIPI, 2013):

AAIPI mendefinisikan bahwa Audit Kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

APLIKASI DI ORGANISASI DAN PEMBAHASAN

Permasalahan umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tantangan, dan peran auditor internal.

Kinerja instansi pemerintah sering mendapat sorotan dari publik, terutama sejak timbulnya

iklim yang lebih demokratis dalam pemerintahan, adanya reformasi birokrasi di semua sektor serta tuntutan transparansi pengelolaan pemerintahan juga menjadi pemicu timbulnya sorotan negatif. Masyarakat mulai mempertanyakan akan nilai yang mereka peroleh atas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Selama ini pandangan masyarakat secara umum tentang suatu kinerja pemerintahan hanya dilihat dari seberapa besar kemampuan instansi pemerintah dalam menyerap anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah melalui APBN tiap tahun. Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur.

Peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan birokrasi merupakan salah satu agenda utama proses Reformasi Birokrasi Internal (RBI) di Kemendikbud. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan peningkatan kinerja instansi tetap merupakan agenda utama kementerian ke depan. Kementerian harus menjaga agar kualitas Laporan keuangan Kemendikbud tetap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Demikian pula dengan akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian/ lembaga dengan kategori minimal B (baik) memberi tantangan kepada kementerian untuk terus meningkatkan kinerja dari perencanaan hingga pelaksanaan program kerja dan anggaran. Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mendorong

Kemendikbud menjadi kementerian yang selalu memberikan layanan prima kepada masyarakat, menjadi wilayah bebas korupsi dan transparan kepada publik.

Adapun tantangan ke depan yang dihadapi Kemendikbud adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik; menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dan anggaran; memperkuat manajemen kinerja pembangunan; memperkuat manajemen aparatur sipil negara.

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian bertujuan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kemendikbud tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerja sama lintas sektor di tingkat nasional. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

Dari permasalahan tersebut, auditor internal Inspektorat Jen-

deral berperan untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memastikan layanan pendidikan dapat terlaksana dengan baik, dan memastikan ketercapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Merujuk organisasi dan tata

internal yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal antara lain: (a) merubah pola pikir auditor internal dari audit konvensional ke audit dengan pendekatan audit kinerja; (b) belum adanya Pedoman Teknis Audit Kinerja, yang ada adalah Pedoman Teknis Audit Kinerja Perguruan Tinggi yang pernah diterbitkan tahun 2007 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-un-



kerja baru, khususnya terkait dengan audit kinerja, sampai saat ini Inspektorat Jenderal belum mengambil langkah awal untuk melakukan persiapan pelaksanaan audit kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dan adanya kebijakan Inspektur Jenderal agar ke depan Inspektorat Jenderal melakukan audit dengan pendekatan audit kinerja.

Untuk melakukan audit dengan pendekatan audit kinerja tersebut, beberapa permasalahan

dengan sehingga perlu dilakukan perubahan secara mendasar; (c) dari sisi kompetensi auditor, relatif masih ada yang belum memahami secara mendalam hal ihwal tentang audit kinerja, termasuk pemahaman tentang Rencana Strategis, kebijakan, program, sasaran dan indikator kinerja.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan audit kinerja ini adalah mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja atas pengelolaan kegiatan pemerintahan. Simpulan yang harus

didapatkan oleh auditor internal pemerintah atas audit kinerja ini adalah apakah organisasi, kegiatan, atau program telah dikelola mengikuti kaidah pengelolaan yang berlaku sehingga diperolehnya kegiatan pemerintahan yang dapat secara efektif mencapai tujuan pembangunan dengan cara-cara yang hemat serta efisien, terbebas dari risiko dan ketidakpastian yang material, dan memenuhi kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.

Pelaksanaan audit kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi fungsi, kegiatan atau aktivitas unit-unit kerja sebagai pelaksana kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan. Audit kinerja ini dilakukan dengan tujuan memberikan rekomendasi agar pengelola kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di pusat dan daerah secara keseluruhan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif serta memberikan umpan balik dan nilai tambah bagi pengambilan keputusan manajemen.

Audit kinerja mencakup pengujian ketaatan manajemen terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi dan kehematan penggunaan sumber daya serta efektivitas program dan kegiatan satuan kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Audit kinerja ditujukan untuk memperoleh keyakinan atau kepastian bahwa kegiatan telah dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif serta

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Cara pengujian dalam audit kinerja

Dalam melakukan audit kinerja harus mempertimbangkan tingkat risiko, *impact*, akuntabilitas, dan signifikansi dari program dan kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hal ini yang sesungguhnya merupakan pengembangan dari audit berbasis risiko. Tujuan audit kinerja untuk menyediakan data dan informasi tentang penetapan dan capaian indikator kinerja, apakah indikator kinerja yang disajikan lengkap dan komprehensif, tepat, relevan bagi kebutuhan pengguna, diperoleh dari informasi yang handal dan akurat.

Setelah melakukan perubahan dan pengayaan pola pendekatan audit ke audit kinerja, ke depan auditor internal Inspektorat Jenderal diharapkan dapat melakukan peran dengan memberikan konsultasi pemberi solusi dalam penyusunan perencanaan strategis dan pengelolaan indikator kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan peningkatan peran seperti ini pada masa yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan level kapabilitas sebagai auditor internal dari level 2 ke level 3.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan permasalahan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Disadari bahwa jenis-jenis audit yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dinilai

masih belum sepenuhnya mengarah pada upaya pencapaian pengungkapan efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam pengelolaan sumber daya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghasilkan *policy* rekomendasi.

2. Diperlukan kesadaran kolektif bahwa audit kinerja sebagai pendekatan baru audit di Inspektorat Jenderal sudah menjadi kebutuhan organisasi serta adanya komitmen perubahan di antara auditor internal.
3. Kesiapan para auditor internal secara umum belum menggambarkan memiliki pemahaman yang cukup terhadap rencana strategis dan indikator kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. *Tools* untuk melakukan audit kinerja juga belum ada.

Atas dasar kesimpulan tersebut, saran-saran yang dapat dikemukakan untuk melakukan perubahan adalah: (1) Agar membangun komitmen bersama di antara para auditor internal untuk melakukan perubahan dan pengayaan pola pendekatan audit dari audit konvensional ke audit kinerja serta komitmen pimpinan; (2) Meningkatkan pemahaman yang cukup terhadap rencana strategis, indikator kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta cara-cara melakukan audit kinerja; (3) Menyusun *tools* untuk melakukan audit kinerja. ■

MENINGKATKAN KUALITAS PENGENDALIAN INTERNAL MELALUI TIM *Liaison Officer* (LO)

Oleh: Bahari Mulawarman

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Permendikbud Nomor 5 tahun 2013, Inspektorat Jenderal selaku Audit Internal berperan aktif dalam berbagai penugasan antara lain melakukan audit operasional, audit ketaatan dan Reviu sebagai langkah penerapan sebagai *assurance*. Di sisi lain dengan perubahan paradigma baru menuntut peran auditor internal sebagai konsultan dan katalis dan menuntut Inspektorat Jenderal melakukan audit dengan pendekatan Audit Berbasis Risiko.

Dalam implementasinya, pendekatan Audit Berbasis Risiko dirasakan belum dapat dilaksanakan secara optimal, mengingat belum diterapkan manajemen risiko, pencitraan yang kurang baik yang masih melekat atas keberadaan Inspektorat Jenderal yang masih dianggap sebagai beban dengan pendekatan *watchdog*-nya serta hasil audit belum memberikan nilai tambah bagi kinerja *auditee* sehingga masih ditemukan banyak temuan berulang dan secara kuantitas terus meningkat.

Dalam menjawab tantangan perubahan fungsi dan paradigma baru peran Audit Internal, Itjen

Kemendikbud telah melakukan berbagai langkah strategis, antara lain dengan pembentukan Tim Pendampingan dan Penghubung atau *Liaison Officer* (LO) untuk seluruh Unit Utama yang dimaksudkan agar Itjen melalui auditor yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan manajemen (*auditee*) dalam mendeteksi risiko yang ada dan juga menyusun aktivitas pengendalian sebagai upaya meminimalisasi risiko yang mengakibatkan timbulnya permasalahan dan temuan yang berulang di masa depan. Tim LO ini dapat memanfaatkan fungsinya sebagai konsultan dan sekaligus sebagai katalis yang diharapkan mampu memberikan saran dan mampu memitigasi risiko-risiko yang mungkin menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Peranan Audit Internal terhadap Kualitas Pengendalian Internal

Bertitik tolak dari pendapat Sawyer's (2005) dan *The Institute Of Internal Audit* (IIA 2001), bahwa Internal Auditor harus melakukan perubahan fungsi audit yaitu selain melakukan audit sebagai sebuah proses yang ideal dan seharusnya dilaksanakan auditor internal, pada saat bersamaan melakukan aktivitas konsultasi yang bertujuan

memberikan nilai tambah bagi organisasi serta pelaksanaan evaluasi (dan/atau penilaian) terhadap proses-proses manajemen risiko, pengendalian, tata kelola yang baik dan akurasi data dan informasi sehingga peranan auditor internal sangat dibutuhkan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pengendalian intern organisasi dalam mencapai tujuan organisasi jangka panjang.

PENERAPAN TIM *LIAISON OFFICER* (LO) ITJEN KEMDIKBUD Arti pentingnya Tim *Liaison Officer*

Sebagai Intitusi Pengawasan Intern yang dinamis, didukung dengan semangat revolusi mental dan reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal dalam upaya pembinaan, pencegahan, dan menindaklanjuti terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mereformasi peran para auditornya yaitu pergeseran peran auditor dari *watchdog* menjadi konsultan sebagai *quality assurance* diyakini akan memberikan nilai tambah bagi pihak *auditee*.

Untuk itu Inspektorat Jenderal telah melakukan langkah srategis antara lain dengan menetapkan

kebijakan pembentukan Tim *Liaison Officer* (LO) sesuai dengan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 5409/F.F1.2/KP/2015, tanggal 31 Agustus 2015 tentang Pembentukan Tim *Liaison Officer* (LO) Itjen Kemendikbud.

Pentingnya Pembentukan Tim *Liaison Officer* (LO) dilandasi oleh beberapa faktor, antara lain, itjen Kemdikbud: (1) Mengalami kesulitan atas pelaksanaan Audit Berbasis Risiko (ABR) karena belum terbentuk profil Risiko satuan kerja yang akan diaudit; (2) Manajemen *auditee* saat ini masih memandang auditor Internal dalam bertugas hanya mencari kesalahan, menjadi beban manajemen (pendekatan *watchdog*); (3) Dalam penugasan belum sepenuhnya melakukan transformasi fungsi audit ke arah pendekatan yang bersifat konsultan dan katalis sehingga *auditee* merasa itjen belum mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan sistem pengendalian dan kinerja organisasi.

Penerapan Peran Tim *Liaison Officer* (LO)

Peranan Tim *Liaison Officer* (LO) yang dibentuk sesuai dengan tugas yang diembannya, akan melaksanakan langkah kerja, antara lain :

1. Sebagai penghubung yang menjembatani antara Inspektorat Jenderal Kemdikbud, selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan **dela-pan unit utama** di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan diarahkan juga

sebagai fasilitator untuk memberikan arahan dan bimbingan kaitan auditor internal untuk penanganan yang memerlukan keahlian khusus, serta kemudahan dalam akses data yang dibutuhkan kedua belah pihak;

2. Menjalin hubungan dan kerja sama antara Inspektorat Jenderal dengan seluruh unit utama dalam hal mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan secara berkala atas kegiatan-kegiatan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan

sehingga tercipta sebuah manajemen risiko yang baik. Harapannya, manajemen risiko yang baik akan memberikan panduan **dalam menerapkan pengendalian internal** yang baik pula sehingga tata kelola *auditee* yang baik akan tercapai.

- c. Mendorong satuan kerja di seluruh unit utama untuk memanfaatkan tim LO sebagai konsultan dan katalis yang akan mendampingi dan menjadi mitra manajemen



3. Tim *Liaison Officer* nantinya akan diarahkan sebagai konsultan, yaitu:

- a. Memberikan masukan yang akurat terkait dengan permasalahan atau kasus yang terjadi pada lingkungan unit kerja di lingkungan Kemendikbud.
- b. Diupayakan mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang menghambat pencapaian tujuan perusahaan

auditee untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan peningkatan peran melalui tim LO ini diharapkan auditor internal mampu memberikan nilai tambah dan kontribusi yang nyata melalui saran yang diberikan, sistem yang dibentuk dan peningkatan kualitas fungsi pengendalian yang akan dijalankan oleh *auditee*.

Kendala Pelaksanaan Tim *Liaison Officer* (LO)

Kendala Tim *Liaison Officer* (LO) antara lain, belum adanya Kelengkapan penugasan (misalnya belum ada pedoman/SOP). Belum dilakukan sosialisasi atas pembentukan, keberadaan dan pentingnya tim LO Itjen Kemdikbud baik internal

mengembangkan perubahan fungsi audit dan mengubah persepsi *watchdog* menjadi fungsi konsultasi dan katalis.

3. Mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi.
4. Bahan pertimbangan bagi pimpinan dan manajemen *auditee*



dan eksternal. Akibatnya belum banyak unit utama yang merespons positif dan memanfaatkan kerja tim tersebut untuk kepentingan aktivitas proses bisnisnya dengan cara mengundang atau sejenis untuk meminta masukan, pemecahan masalah atau penyusunan peta Risiko dan lain-lain. Adanya standarisasi pola kerja Tim *Liaison Officer* (LO) belum seimbang antara tugas masing-masing tim antar unit utama.

Manfaat dan Dampak Penerapan Tim *Liaison Officer* (LO)

1. Memudahkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pelaksanaan Audit Berbasis Risiko (ABR) setelah secara bersama mampu tersusun manajemen risiko.
2. Menjadikan auditor internal

terhadap penting keberadaan *Liaison Officer* (LO).

5. Melalui peran aktif Tim *Liaison Officer* (LO) manajemen *auditee* memiliki profil risiko, dan Inspektorat Jenderal dapat menerapkan audit berbasis Risiko guna mencegah temuan berulang.

Hasil Akhir yang Diharapkan Diwujudkan

- Dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal *auditee*.
- Tidak terjadi temuan/permasalahan yang berulang di satuan kerja yang diaudit.
- Peningkatan kualitas Inspektorat Jenderal Kemendikbud terkait *Maturity Level* (tingkat kedewasaan organisasi) dari posisi level 2 naik menjadi peringkat 3.

- Meningkatkan kepercayaan manajemen *auditee* untuk memanfaatkan tim LO Itjen dalam rangka mengawal pelaksanaan proses bisnisnya.

Kesimpulan

- Memberikan nilai tambah bagi *auditee*, sistem yang dibentuk dan peningkatan kualitas fungsi pengendalian dalam mencapai tujuannya.
- Mendorong auditor internal menjadi konsultan dan katalis yang akan membantu manajemen menyusun profil/peta risiko.
- Profil Risiko yang disusun melalui kemitraan yang dibangun akan memudahkan pelaksanaan Audit Berbasis Risiko (ABR) dan diharapkan tidak terjadi lagi temuan yang berulang.

Saran

- Menyusun dan menyempurnakan kelengkapan penugasan Tim LO, antara lain: pedoman, pembentukan tim, dan termasuk kejelasan dukungan dana;
- Melakukan sosialisasi keberadaan Tim *Liaison Officer* (LO) yang akan menjadi mitra dan pemandu organisasi dalam mencapai tujuan.
- Mendorong pelaksanaan penugasan secara simultan tim LO untuk berperan aktif dan memberi nilai tambah bagi *auditee*, sehingga keberadaan LO dibutuhkan dan dianggap penting oleh *auditee*.
- Peningkatan kualitas SDM terkait peran auditor yang diarahkan berperan sebagai konsultan untuk disiapkan sebagai narasumber, fasilitator dan lain-lain yang sejenis. ■

The Top 10 best Education

by. Riena Dyaningtyas Rampan

Education is important and major concern in most countries and this is the main issues for all countries in the world. Human capital investments have played a crucial role in the early economic.

Some countries not able to organize good system for education. Like in poor countries and some in Southeast Asia. NJ MED published its first Annual Education Poll in 2013, to rank 209 nations education systems. The poll's purpose is to gather information on how countries are preparing their youths for the 21st century global knowledge base economy. Unfortunately not every country in this world can arrange good system for education and even they cannot arrange it because war, natural disaster, or revolution. Over half of the countries on the planet, do not have educational data available. Most of the information on education, they do have is two to three years old, or even worse five

to ten years old. Only 85 countries out 209, educational information is up to date.

This article is purpose to support other countries to make better quality system and better future for education. Those results will be published in July's 2017 Global Education Report. Until we wait the report this is the top 10 rank best system education in the world.

10. Hongkong

Hong Kong has the world's highest enrollment rate for Primary age students. Finishing 14th in last year's Top 20 rankings, if the country ever wants to finish in the Top 10, it has to improve its early-childhood education enrollment. However, with its current success in Primary

age student's test scores and enrollment completion rates that seems highly unlikely.

9. Sweden

Sweden progress over the last three years has been impressive. Keeping pace with its other Nordic mates (Finland, Denmark and Norway), Sweden's enrollment of Secondary age students (15 to 18) is third in the world. While their completion rates for Primary age students (five to 13) ranks sixth. If they hope to improve on their last year finale ranking of 18, their Secondary student's high school graduation rates (69%) have to reach higher levels.

8. Israel

Israel remains formidable in the international circles, has its country's educational system for early-childhood development has risen to number two in the world. And their improvement in Primary education completion rates and in school enrollment rates are among the highest in the world. It's not impossible for Israel to finish in the Top 5 at the end of the year.

teachers have been fighting for better wages, more classroom support, and the need to recruit more teachers. If this problem continues, the UK may fall out of the top 10 for the first time.

6. Norway

Norway finished 2016 ranked number 16, but has moved up 10 spots in the first quarter rankings for 2017. Norway's teacher to stu-

international test score results will determine how high they finish in the final poll in December.

5. Russia

After, finishing its highest ever in the World Top 20 Education Poll – number 3. Russia remains one of Europe's top countries in preparing its students for the workforce. Their student to teacher ratio for students 14 to 18 (one teacher for every ninth



7. United Kingdom

Dropping one spot from last year's final rankings, the UK teacher's issues is starting to affect their international rankings. For over the last four-years, the country's

dent ratio for Primary age students is second in the world (one teacher for every students), and ranks fifth in the world for Secondary students (one teacher for every ten students). Like most countries, their

student), is the 3rd highest ranked in the world. Making Russia a clear favor to finish in the top 5, for the third year in a row.

4. Denmark

Denmark perhaps the most underappreciated country in the world, is again among the elite in educational development. Finishing last year number 8 in the World Top 20 Education Poll, Denmark rated in all five of the new indicators. Finishing 5th in Secondary age students in school, and 7th and 9th for teachers to student ratios for Primary and Secondary schools.

pletion rate of students 5 to 14, in the five new indicators. However, it should be noted, South Korea, for the last three years were projected, to finish second or third, but after the annual fall test scores and graduation rates of high school and college students, they finish first in the annual poll.

2. Japan

Second place finishers for the

opment of students between the ages of 5 to 14.

1. Finland

Finland has held the unofficial title as the country with the world's best education system, since 2000. After, adding five new key indicators to our educational ranking system, Finland is projected to take the official title in 2017. By outperforming, Japan and the three time



Finland students enjoy when they read at library, beside learning they improve their character.

3. South Korea

South Korea, the three-time winner of the World Top 20 Education Poll ranking system, is projected to finish third in 2017. South Korea only performed well in the com-

last three years in the World Top 20 Education Poll. Japan is projected to finish second for the fourth year in a row. Japan education system continues to be rated has one of the best. With its excellent devel-

winner of our ranking system, South Korea. Finland ranked higher in 3 of the new indicators – Secondary children in school, and teachers to student ratio for both Primary and Secondary schools. ■

72TH INDONESIA KERJA BERSAMA

**DENGAN SEMANGAT
PROKLAMASI 1945,**

**KITA WUJUDKAN
PENDIDIKAN YANG MERATA
DAN BERKUALITAS**



ZI-WBK



**KEMENDIKBUD
BERSAMA**



**18th ASIAN GAMES
Jakarta
Palembang
2018**